

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Empiris Gerakan Protes Islam Lokal di Sampang

Gerakan protes Islam lokal Madura dalam menentang keberadaan ideologi dan kelompok Syi'ah di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah sebuah peristiwa yang menegaskan bahwa banyak faktor yang bertali temali dalam menciptakan integrasi maupun disintegrasi sosial.

Kesamaan sosial orang Madura yang saling silang menyilang (*cross cutting affiliations*), yang seharusnya menjadi peredam terjadinya disintegrasi, seperti kesamaan etnis, budaya, serta bahasa tidak bisa menjembatani perbedaan terkait dengan konsep keberagaman orang Madura yang homogen Islam Sunni ala NU. Dalam aktualisasinya, gerakan protes orang Madura yang Islam Sunni ala NU, khususnya di Sampang yang muncul ke permukaan secara signifikan, diakibatkan oleh persoalan perbedaan ideologi. Akan tetapi, analisis empiris terhadap gerakan protes tersebut memunculkan banyak faktor yang saling berkelindan, mulai dari persoalan ekonomi, budaya, sampai politik lokal.

Gerakan protes di Kabupaten Sampang menentang keberadaan kelompok Syi'ah terjadi dua kali, dengan berbagai potensi gerakan protes yang siap terjadi kapan saja. Yaitu, pada tanggal 29 Desember 2011, serta tanggal 26 Agustus 2012. Gerakan protes dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 ini membumihanguskan rumah keluarga dan beberapa pengikut pemimpin kelompok Syi'ah Sampang, Tajul Muluk. Kemudian gerakan protes

yang lebih besar lagi terjadi pada tanggal 26 Agustus dan mengakibatkan jatuhnya korban tewas satu orang dan luka parah sebanyak 10 orang. Sementara ada sekitar 48 rumah kelompok Syi'ah yang dibakar massa. Perseteruan ini terjadi antara kelompok pemrotes yang tergabung dalam beberapa elemen *civil society* di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan seperti MUI, NU, BASSRA, dan FMU Sampang-Pamekasan, dengan kelompok keagamaan Syi'ah pimpinan KH. Tajul Muluk, yang juga menjabat ketua Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Kabupaten Sampang.

Di mata masyarakat Omben, keluarga besar KH. Tajul Muluk adalah keluarga yang dihormati. Bahkan, sebelum terjadi gerakan protes, masyarakat sekitar menyebut keluarga Tajul Muluk dengan kata *ratoh*. Ungkapan *ratoh* diberikan kepada kepemimpinan yang tidak sekuler. Pemimpin yang dimaksud dalam ungkapan itu adalah pemimpin yang juga orang tua dan guru bagi rakyatnya. Dari semua rumah yang dibakar, satu rumah adalah rumah ibu Tajul, ibu Ummah. Satu lagi adalah rumah Tajul yang juga dipakai sebagai pesantren dan madrasah bagi kelompok Syi'ah. Sejak hari itu, ratusan keluarga Syi'ah di Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang mengungsi.

Fakta-fakta yang selama ini sering dianggap sebagai faktor signifikan, yang memicu terjadinya gerakan protes ini, terkait erat dengan perbedaan paham keagamaan antara kelompok Islam lokal Madura dengan kelompok Syi'ah. Akan tetapi, dalam kacamata dan praksis gerakan sosial, perbedaan paham keagamaan ini hanyalah sebuah *framing* untuk menarik sebanyak mungkin partisipan gerakan protes. Oleh karena itu, *framing* gerakan

protes ini meniscayakan sebuah penjelasan dari aspek empiris-dinamisnya. Dalam paparan data berikut ini, aspek ini berkaitan erat dengan kepentingan-kepentingan pragmatis ekonomis, kesempatan politik, keluhan komunal (*grievance*), mobilisasi struktur sampai dengan pelestarian budaya patronase elit keagamaan orang Madura.

Bagi orang Madura, paham keagamaan Islam lokal (Sunni) yang selama ini mereka amalkan merupakan seperangkat sistem yang terkait dengan nilai budaya dan keagamaan orang Madura. Sistem nilai budaya dan keagamaan ini mampu memberikan kekuatan karakter bagi orang Madura yang dibangun dari budaya dan agama (Islam). Karakter itulah yang mendorong orang Madura melakukan banyak aktivitas kesenian dan keagamaan yang khas. Kemungkinan, tidak ada daerah lain di Indonesia yang menandingi intensitas ritual keislaman di Madura. Hubungan sosial masyarakatnya dibangun dari aktivitas-aktivitas pengajian, *Molodan*, *tahlilan*, *muslimatan*, *samroan*, *yasinan*, *dibaán*, *sabellesen*, *nariyaán*, *hol ngeholle* dan sebagainya. Simbol ulama atau kyai menjadi sangat kuat dan berpengaruh di Madura.

Pesantren menjadi basis pendidikan utama dibanding pendidikan formal lainnya. Banyak anak bercita-cita menjadi kyai dan banyak perempuan yang merasa beruntung dinikahi kyai, meskipun bukan sebagai istri tunggal. Pada saat yang sama karakter dan nilai ini menjelma sebagai moralitas. Hal-hal yang utama dan baik adalah bersumber dari keyakinan budaya dan Islam. Orang Madura sangat respek pada orang tua, tokoh budaya, tokoh masyarakat, maupun politisi yang bisa menyajikan dirinya sebagai figur yang memiliki kapasitas

keislaman dan bisa beradaptasi dengan karakter Madura. Secara kasat mata bisa dilihat bangunan hierarki struktur hubungan sosial yang dibangun antara tokoh-tokoh tersebut dengan masyarakat. Sangat tegas pembedaan siapa kyai, siapa orang biasa, siapa *rato*, siapa preman, dan sebagainya.

Akan tetapi, kekuatan karakter ini tidak diimbangi dengan pemenuhan akses ekonomi dan pendidikan yang baik di Madura. Tanah yang tidak terlalu baik untuk pertanian, membuat hampir separuh warga Madura bermigrasi ke Jawa pada tahun 1930 dan dengan program transmigrasi, ekspansi masyarakat Madura hingga ke Kalimantan dan Sumatra.

Pendidikan yang eksklusif pada pendidikan Islam juga seringkali membuat masyarakatnya *phobia* dengan simbol-simbol “globalisasi”, sehingga hal ini menjadi bumerang bagi bangunan kultur di Madura. Moralitas yang dibangun oleh kekuatan budaya dan Islam mudah sekali terjebak pada fanatisme dan kekerasan. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak studi,¹ masyarakat Madura dikenali sangat fanatik kepada Islam dengan mazhab Sunni.

Madzhab ini di Indonesia direpresentasi sebagai mayoritas dengan simbol organisasi terkuatnya adalah NU. Untuk soal fanatis, hal ini sering disebut-sebut sebagai masalah di Madura. Orang Madura bisa menjadi siapa saja, karena yang menjadi tolok ukur orang Madura adalah agama (Islam).

¹ Lihat misalnya dalam Kuntowijoyo, *Madura: Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris 1850 – 1940*. (Yogyakarta: Mata Bangsa Press 2002), 332. Bandingkan dengan Imam B. Jauhari. *Perubahan Makna Budaya Kerapan Sapi dalam Interaksionisme Orang Madura*, Tesis Pasca sarjana UNPAD (Bandung: tidak dipublikasikan 2004), 110. Bandingkan juga dengan, Soemanto, R.B. *Suatu Telaah Deskriptif Tentang Perubahan Sosial di Masyarakat Desa Banyuwangi, Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan*. Dalam *Madura V*, Kumpulan Makalah, Loka Karya Penelitian Sosial Budaya. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1981), 165.

Syarat menjadi orang Madura itu adalah ia harus Islam, bukan hanya identik tapi harus mutlak Islam.

Terkait dengan hal tersebut di atas, kondisi sosial keagamaan masyarakat di lokasi penelitian dan umumnya di Kabupaten Sampang, bisa dikatakan 100% Islam dan khususnya Islam Sunni ala NU. Hal ini wajar saja, tidak satupun ditemukan gereja maupun tempat ibadah agama lain di Sampang. Tidak juga ditemukan ada aliran Islam lain di Sampang khususnya kecuali aliran Islam Sunni ala NU. Seolah menjadi pembenar bahwa aksi massa melakukan aksi protes dengan kekerasan terhadap komunitas Syi'ah karena rumah tersebut dijadikan pesantren yang mengajarkan mazhab di luar Sunni, yaitu Syi'ah.

1. Sejarah Terbentuknya Komunitas Syi'ah di Sampang

Pada awal 1980-an, Makmun, seorang kyai di Nangkernang, Desa Karang Gayam, Sampang, mendapatkan kabar dari sahabatnya di Iran mengenai revolusi Iran. Keberhasilan kaum ulama Iran memimpin revolusi penumbangan monarki Syah Iran Reza Pahlevi –sebuah rezim monarki yang didukung oleh USA– menjadi momentum bagi kaum muslim di dunia dan termasuk Indonesia untuk menengok dan mempelajari ajaran Syi'ah. Makmun sangat terinspirasi dengan revolusi Islam Iran dan mengagumi pemimpinnya Ayatollah Ali Khomeini, selanjutnya hal ini menjadi pendorong bagi Makmun untuk mendalami ajaran-ajaran Syi'ah. Makmun sadar bahwa mengajarkan Syi'ah di desanya dan di Madura pada umumnya bukanlah hal yang mudah.²

² Seri Kertas Kerja Proyek Penelitian *Aliran-Aliran Kepercayaan di Madura*, (Bangkalan: Pusat Penelitian Kebudayaan Madura, Universitas Trunojoyo, 2009), 67-70.

Hal ini karena mayoritas ulama dan kaum muslim di wilayah ini adalah pengikut Islam Sunni yang fanatik, karena itu Makmun dalam mempelajari dan mengajarkan ajaran-ajaran Syi'ah dilakukannya secara pelan, tidak secara langsung dan tidak terbuka. Sebagai langkah awal, pada 1983, Makmun lantas mengirim tiga anak laki-lakinya, Iklil al Milal (42 tahun), Tajul Muluk (40), Roisul Hukama (36), dan Ummi Hani ke Pesantren Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil, Pasuruan. YAPI dikenal sebagai pesantren yang cenderung pada madzhab Syi'ah Ja'fariyah. Pada 1991, anak-anak Makmun telah kembali ke Sampang.

Di antara anak-anak Makmun yang belajar di YAPI hanya Tajul Muluk, yang melanjutkan sekolah ke pesantren Sayyid Muhammad Al-Maliki di Arab Saudi pada 1993. Karena terkendala biaya, sekolahnya berhenti di tengah jalan. Tajul Muluk yang bernama asli Ali Murtadha tetap bertahan di Arab Saudi menjadi pekerja dan kembali pulang ke Indonesia pada tahun 1999.

Pulang ke Indonesia, Tajul Muluk menetap di tempat kelahirannya, Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam, Sampang. Keluarga Makmun dan masyarakat di dusunnya menyambutnya dengan gembira. Sejumlah warga desa yang juga murid dari Makmun sang ayah, mewakafkan sebidang tanah untuk didirikan pesantren. Secara gotong royong pada awal tahun 2004 warga desa yang belajar mengaji kepada Makmun dan Tajul Muluk bersama-sama membantu mendirikan rumah kediaman Tajul Muluk yang berfungsi menjadi pesantren, lengkap dengan mushalla dan beberapa ruangan kelas untuk aktifitas belajar agama. Pesantren kecil ini diberi nama Misbahul Huda, dan ustadz atau guru

yang mengajar di pesantren ini adalah Tajul Muluk bersama semua saudara-saudaranya sesama alumni YAPI.³

Berbeda dengan Makmun sang ayah, Tajul Muluk mengajar dan berdakwah ajaran Syi'ah secara terbuka dan terang-terangan. Sikap Tajul yang egaliter, supel, ringan tangan dan cekatan dalam membantu warga desa yang membutuhkan, serta tidak bersedia menerima imbalan setelah berceramah agama menempatkan Tajul sebagai kyai muda yang sangat dihormati seluruh warga Desa Karang Gayam dan tentu saja hal ini mempermudah Tajul dalam berdakwah. Dalam waktu yang tidak lama, hanya sekitar tiga tahun, ratusan warga di Desa Karang Gayam dan di desa sebelahnya Desa Blu'uran telah menjadi pengikut ajaran Syi'ah dan sekaligus murid Tajul Muluk yang setia.

Perkembangan dakwah Tajul Muluk dalam menyebarkan Syi'ah akhirnya mendapat respon dari para ulama setempat. Tersebutlah Ali Karrar Shinhaji, Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Pamekasan dan masih terhitung kerabat dekat dari Makmun. Dalam sebuah pertemuan dengan Tajul dan saudara-saudaranya pada awal 2004, Karrar sangat berkeberatan dan tidak menyetujui aktivitas dakwah Tajul Muluk yang mengajarkan ajaran Syi'ah.

Bagi Karrar, Syi'ah adalah madzhab dalam Islam yang salah dan sesat. Tidak hanya Karrar, para ulama-ulama lain di Omben juga bersikap yang sama, akan tetapi mereka tidak bisa menghalang-halangi aktifitas dakwah Tajul Muluk karena masih menaruh rasa hormat atas Kyai Makmun, ayah dari Tajul Muluk.

³ Seri Kertas Kerja Proyek Penelitian *Aliran-Aliran...* 68.

Akan tetapi, pada Juni 2004 Kyai Makmun yang sebelumnya sudah jatuh sakit akhirnya meninggal dunia. Dan tidak ada lagi yang menjadi penghalang bagi para ulama di Omben untuk menentang aktivitas penyebaran Syi'ah yang dilakukan para kyai muda anak-anak Makmun.

2. Faktor-faktor Terjadinya Gerakan Protes Islam Lokal Madura

a. Faktor Budaya dan Etnisitas

Gerakan protes Islam lokal menentang kelompok aliran Syi'ah yang terjadi di Desa Karang Gayam juga erat kaitannya dengan persoalan budaya orang Madura. Terutama budaya yang berkaitan dengan kehormatan dan agama/aliran agama yang harus diikuti oleh orang Madura, sebagaimana pembahasan di atas. Agama bagi orang Madura adalah Islam, khususnya Islam aliran Sunni. Agama dengan aliran ini sudah meresap dan mewarnai pola kehidupan sosial mereka. Agama dianggap hal yang suci atau sakral dan harus dibela, serta merupakan pedoman hidup bagi manusia. Walaupun di daerah penelitian mungkin tidak dianggap “murni” oleh pengamat dari luar, akan tetapi bagi masyarakat Karang Gayam cara Islam lokal⁴ yang sekarang mereka taati, adalah Islam yang mereka hormati.

Islam merupakan salah satu sifat yang mendefinisikan orang Madura dengan akibat bahwa semua orang Madura adalah Islam. Menurut informan,⁵ belum pernah terjadi bahwa seorang Madura itu pindah agama. Menurut mereka, orang yang beragama selain Islam atau mengikuti aliran sebagaimana Islam lokal Sunni (NU) itu bisa dipastikan adalah orang luar Madura, atau dianggap sebagai

⁴ Lihat lebih detail dalam, Mark R. Woodward. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 170.

⁵ D.Zawawi Imron, *Wawancara*, Sumenep, 13 Desember 2014.

bukan orang Madura. Simbol keagamaan ini dikemukakan dalam ungkapan *abantal syahadat, asapo' iman, pajung Allah*. Hal ini menggambarkan bahwa orang Madura berjiwa Islam. Menghina agama Islam lokal sebagaimana yang dipraktekkan orang Madura selama ini adalah sama dengan menyinggung harga diri.

Dasar utama dari harga diri ini adalah perasaan malu (*malo, todus*). Apabila harga diri orang Madura merasa direndahkan maka konflik fisik bisa terjadi. Kalau seseorang lelaki Madura yang tersinggung karena masalah harga diri kemudian tidak membalas, tetangga, teman dekat, dan keluarga biasanya menyebut lelaki tersebut *tadha' ajjina* atau *tadha' argana* (tidak ada harganya). Harga diri juga disebut *ajjina aba'* atau *argana aba'*. Pentingnya harga diri tercermin dari ungkapan *lebbi bagus pote tolang e tembang pote mata*. Artinya lebih baik mati daripada harus menanggung malu karena tidak dapat membela harga diri dan kehormatan.

Menurut informan,⁶ harga diri atau martabat adalah nilai yang mendasar pada orang Madura. Hal ini harus selalu dipertahankan agar jangan direndahkan. Harga diri ini menunjukkan kemampuan seorang laki-laki dalam menjunjung tinggi dan membela nama baik orang tua dan keturunan. Kalau seseorang diremehkan atau direndahkan ia akan tersinggung karena harga dirinya. Penghinaan ini biasanya berkaitan dengan ego, wanita dan agama. Terkait dengan kehormatan inilah kemudian masalah kesopanan begitu ditekankan dalam kehidupan orang Madura seperti tersebut di atas. Bagaimanapun, kesopanan

⁶ D.Zawawi Imron, *Wawancara*, Sumenep, Sumenep, 23 September 2004. Lihat lebih lanjut dalam, Imam.B Jauhari, *Perubahan Makna Budaya Kerapan Sapi dalam interaksionisme orang Madura*. (Bandung: Tesis Unpad tidak dipublikasikan, 2004), 110.

mengatur atau menstruktur situasi sosial sedemikian rupa sampai pelanggaran kehormatan dicegah, lelaki diatur paling tegas. Mereka adalah pandu pemeliharaan aturan-aturan ini.

Konsep budaya ini masih relevan dengan kondisi masyarakat Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam. Dilihat dari tabel keberagamaan, masyarakat Karang Gayam seratus persen beragama Islam Sunni ala NU. Menurut seorang informan Haji Ahmad, perbedaan dalam hal Agama dan aliran keagamaan bagi orang Madura bisa dianggap tidak sopan dan menginjak harga diri orang Madura. Jadi, keberadaan kelompok Syi'ah di kampungnya merupakan sebuah áib yang harus dibuang ke luar Madura. Karena ajaran Syi'ah Tajul ini ingin menghapus banyak tradisi orang Madura yang terkait dengan kehormatan, seperti hormat kepada guru atau kyai. Kelompok Syi'ah juga seringkali menghina kyai, mencemooh *bhuju'* Batu Ampar, (leluhur orang Madura, khususnya Sampang yang dihormati yang kuburannya berada di daerah Batu Ampar Sampang) dan mempraktekkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi Islam lokal Madura.

Menurut Rudi Setiadi,⁷ hal ini terjadi karena sikap intoleransi sebagian masyarakat Madura yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan umum yang rendah serta akses ke lokasi konflik yang masih tertutup. Walaupun dia tidak menampik, bahwa pendidikan serta akses yang terbuka lebar ke dunia luar akan serta merta melunturkan budaya orang Madura yang diwariskan turun temurun. Ketika harga diri orang Madura yang terkait dengan agama yang dipraktekkan merasa

⁷ Rudi setiadi, Kepala Bakesbangpol Sampang. *Wawancara*, Sampang 15 Januari 2014.

direndahkan maka konflik fisik bisa terjadi. Tentunya konflik fisik yang terjadi tidak serta merta menjadi *manifest*, karena konflik secara sosial membutuhkan perangkat dan *faktor* pendukung lainnya sehingga menjelma sebagai sebuah gerakan protes.

b. Faktor Keluhan Sosial (*Grievance*)

Gerakan protes dengan kekerasan yang kemudian berwujud penyerangan dan pembakaran atas tempat peribadatan beserta madrasah Syi'ah di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang pada 29 Desember 2011 dan pada tanggal 26 Agustus 2012 lalu dipicu oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut sebenarnya merupakan keluhan (*grievance*) massa Islam lokal terhadap keberadaan kelompok Syi'ah yang dianggap sesat.

Bukan hanya faktor konflik keluarga sebagaimana selama ini dipahami banyak orang, tapi juga sangat erat terkait dengan konflik paham keagamaan dan harga diri orang Madura. Rasa dendam dan permusuhan Rois Hukama, pemimpin Sunni kepada kakaknya, Tajul Muluk pemimpin Syi'ah karena persoalan perempuan pada dasarnya hanya menjadi pemicu konflik Sunni dan Syi'ah yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Keluhan massa tersebut setidaknya sudah terjadi sejak tahun 2004, para ulama mulai melakukan resistensi di banyak forum terbuka terhadap keberadaan penganut Syi'ah di Sampang. Perkembangan Syi'ah dinilai akan menghancurkan keberadaan paham *Ahlu Sunnah wal Jamáah* yang sudah lama berkembang di Sampang. Karena itu, selagi masih kecil, perkembangan Syi'ah itu harus

segera dilumpuhkan. Sejak tahun itu secara kontinyu, ulama Sunni melakukan tuduhan bahwa ajaran yang dibawa Tajul Muluk adalah sesat serta menodai ajaran agama Islam yang murni sebagaimana yang sudah dipraktekkan oleh komunitas Islam lokal Sunni secara turun temurun.

Keluhan-keluhan sosial kelompok Islam lokal terkait dengan kesesatan aliran keagamaan Syi'ah di Desa Karang Gayam yang di ajarkan tajul Muluk meliputi beberapa hal, yaitu;⁸ pertama, Mereka (ajaran Syi'ah Tajul Muluk Ma'mun, red) menganggap bahwa Allah masih butuh kepada *tho'at* dan ibadah hambaNya dengan berdalil Q.S.Al-Dzariyat: 56 (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) kedua, Mereka menganggap bahwa Allah hanya dapat menyembuhkan orang sakit, tidak begitu dengan sebaliknya, dengan memakai dalil Q.S. As-Syu'ara' ayat 80 ; (واذا مرضت فهو يشفين)

Ketiga, Mereka menganggap bahwa para imam mereka mengetahui ilmu ghaib dari selain Allah. Keempat, Mereka menganggap bahwa kitab suci Al-Qur'an yang ada pada tangan muslimin se-alam semesta tidak murni diturunkan Allah, akan tetapi sudah terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan dalam susunan Ayat-ayatnya.

Kelima, Mereka menganggap bahwa semua umat Islam – selain kaum Syi'ah - mulai dari para Shahabat Nabi hingga hari qiamat – termasuk didalamnya tiga Khalifah Nabi (Abu Bakar, Umar, Utsman) dan imam empat Madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'ie, Ahmad) termasuk pula Bujuk Batu

⁸ KH. Syafiuddin salah seorang tokoh *civil society*- Kabupaten Sampang dan Pamekasan, *Wawancara*, Omben Sampang, 22 Desember 2013. Beliau juga menjadi ketua NU Kabupaten Sampang. Wawancara juga dengan ketua FMU Sampang-Pamekasan KH. Ali Karrar Shinhaji yang juga menjabat ketua FPI Pamekasan, Proppo, Pamekasan, 22 Desember 2013.

Ampar (seorang leluhur Madura yang shalih dan sangat dihormati oleh orang Madura, banyak orang Madura yang senantiasa ziarah ke kuburannya untuk mendoakannya) – adalah orang-orang pendusta, bodoh lagi murtad karena membenarkan tiga Khalifah tersebut didalam merebut kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.

Keenam, mereka menganggap bahwa Imam Ghazali bukan ulama' akan tetapi adalah dukun. Ketujuh, dari Bab Wudlu', mereka menganggap: Cukup mengusap kaki dalam wudlu' yang berhukum wajib dibasuh. Karena mereka menganggap bahwa kelakuan dalam wudlu' ada dua macam: (dua usapan) dan (dua basuhan) dengan berdalil ayat (). Kedelapan, dari bab shalat, mereka menambah dan mengurangi rukun-rukun shalat seperti mengangkat tangan disetiap naik dan turunnya anggota badan, dan mengurangi bacaan fatihah dalam *shalat ruba'iyah* dengan menganggap cukup membaca fatihah dalam dua raka'at saja. Kesembilan di dalam shalat ketika sujud mereka bersujud diatas kertas yang bertuliskan: Ali, Fathimah, Hasan, Husein. Kesepuluh, menganggap bolehnya jama' Shalat dzuhur dan ashar, maghrib dan isya' tanpa ada sebab safar atau hujan dengan berdalil Aya

waktu untuk dzuhur dan ashar, waktu untuk maghrib dan isya'

وقت غسق الليل وقرآن الفجر waktu untuk shubuh.

Sebelas, Menganggap Sholat Jum'at berhukum sunnah bagi ma'mum, dan fardlu bagi imam. Dua belas, menganggap bahwa shalat tarawih itu tidak ada di zaman Nabi SAW, melainkan diadakan oleh Umar Ibn Khattab untuk mengumpulkan Muslimin. Tiga belas, mengharamkan jeroan ayam dan kelinci.

Empat belas, mengharamkan puasa Asyura' dengan dalih bahwa Ahlussunnah menuduh Rasul belajar tatakrama kepada orang Yahudi. Lima belas, Membenci ajaran Ahlussunnah dan hanya menganggap benar ajaran Syi'ah. Enam belas, Menganggap *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamáah* khususnya para Shahabat lancang terhadap Nabi SAW. Karena mereka meriwayatkan Hadits-hadits yang menyangkut rahasia Nabi SAW. Seperti Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berkencing sambil berdiri dengan dikelilingi para Shahabat.

Tujuh belas, menganggap curang terhadap Ahlu Sunnah. Karena mereka (Ahlu Sunnah) membuang banyak riwayat dari Ali bin Abi Thalib ra. dan memasang banyak riwayat Abi Hurairah ra. dengan menganggap Ali ra. sebagai shahibul bait dan Abu Hurairah sebagai tamu, maka pasti shahibul bait lebih mengetahui dari pada tamu. Delapan belas, menganggap bahwa kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim tidak shahih. Sembilan belas, menganggap Abu Thalib termasuk dari Ahli Surga, dan ingkar terhadap Hadits yang menjelaskan adanya Abu Thalib didalam siksaan ringan dalam neraka. Dua puluh, mengungkit-ungkit tentang pembunuhan terhadap Husein ra. dan sangat mencaci maki pelakunya dengan diatasnamakan orang Sunni. Dua puluh satu, mereka menganggap "Sesudah masuk aliran tersebut lebih merasakan khusyu' dalam Shalat daripada Shalat-shalat sebelumnya." Dua puluh dua, mereka menjamin masuk Surga dan dijauhkan dari api nereka bagi pengikutnya.⁹

Selain keluhan tentang kesesatan ajaran Syi'ah, keluhan komunitas Islam di Desa Karang Gayam lainnya adalah terkait dengan metode dakwah yang

⁹ Laporan investigasi MUI, *Fatwa Kesesatan Ajaran Tajul Muluk*, Sampang, Pebruari 2012.

digunakan komunitas Syi'ah yang dianggap terlalu keras dan tidak cocok diterapkan di Madura. Komunitas Islam lokal Sunni di Desa Karang Gayam merasa resah karena tradisi hormat dan ta'dzim kepada guru khususnya kyai, dianggap bid'ah dan seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat.

Dalam tradisi orang Madura yang masih sangat paternalistik justru para kyai dan santri-santri mereka memainkan peranan yang penting dalam berbagai *event* kehidupan masyarakat. Kaum elit agama menjadi pemimpin alami para penduduk. Setiap ucapan kyai dan perilakunya diikuti oleh penduduk, dan kata-katanya dianggap penuh petuah dan nasihat. Seperti nyata dari ungkapan, *bhuppa' babbhu', guru, rato*. Kyai merupakan orang nomor dua setelah orang tua yang harus diagungkan. Doa restu kyai adalah paling manjur selain ibu dan bapak dalam setiap tindakan yang akan diambil, nasihat kyai selalu diminta lebih dahulu. Selain itu, metode mengajar yang lebih menghargai rasionalitas itu juga dianggap merusak tradisi pesantren yang selama ini lebih mengandalkan hapalan. Komunitas Syi'ah menganggap kyai tidak menginginkan santrinya pintar, tapi lebih mengharapkan santri mereka tetap hormat dan manut kepada kyai.

Kyai di Madura adalah pemimpin informal, semua masalah keluarga dan masyarakat yang sulit dipecahkan diserahkan padanya untuk diselesaikan. Baik masalah ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dalam masalah yang sangat pribadi, misalnya masalah perjodohan dan keluarga, kyai merupakan orang yang tepat untuk bertanya dan meminta nasihat dan tidak jarang masalah harga diripun diserahkan kepada kyai. sementara kyai bagi komunitas Syi'ah di Desa Karang Gayam, tidak mempunyai posisi yang istimewa sehingga layak untuk dihormati

sedemikian rupa. Akan tetapi, hormat dan *ta'dzim* itu haruslah diperuntukkan hanya kepada para Imam Syi'ah, yang sudah diyakini kualitas keimanan dan kepemimpinannya, serta jelas kemaksumannya dari segala perbuatan dosa.

Keluhan lain dari kelompok Islam lokal Desa Karang Gayam khususnya, dan orang Madura umumnya terkait keberadaan kelompok Syi'ah, adalah karena kelompok Syi'ah berusaha menghapus tradisi Maulid Nabi yang sudah lama dianggap wajib oleh warga. Dalam tradisi Madura maulid atau *molod* dalam Bahasa Madura adalah sebuah tradisi perayaan keagamaan yang sangat diutamakan, bahkan pesta perayaannya jauh lebih besar dan lebih lama rentang waktunya ketimbang jenis perayaan keagamaan yang lain. Tradisi *molod* bisa berlangsung bahkan selama dua bulan di Madura, khususnya di Sampang, yang tercatat dimulai pada bulan Robi'ul Awwal sampai dengan bulan Robi'ul Akhir masih ada saja warga yang memperingati perayaan *molod* ini.

Orang Madura menganggap bahwa dengan memperingati *molod* ini seseorang sudah dianggap menunaikan kewajiban bersyukur kepada Allah SWT atas diutusnya *Kanjeng Guste* (kanjeng Gusti) Nabi Muhammad SAW. *Kanjeng Guste* inilah yang bisa *nyalamettaghi abhe'* (menyelamatkan kehidupan seseorang) di dunia dan di akhirat. Tidak jarang banyak handai taulan yang ada di perantauan akan merasa terpanggil pulang ke Madura untuk merayakan peringatan *molod* ini.

Komunitas Islam lokal Madura juga meyakini, bahwa ketika sudah melaksanakan peringatan *molod*, hal ini akan membawa barokah terhadap kehidupan yang bersangkutan. Bahkan, banyak yang testimoni, bahwa usaha

yang dilakukannya baik di perantauan maupun yang di pulau Madura sudah mengalami perkembangan yang pesat dan banyak mendapat rezeki berkat barokah dari melaksanakan perayaan *molod* di kampungnya.

Barokah *molod* yang diyakini besar, membuat pelaksanaan tradisi ini juga mengalami perkembangan. Pada awal mulanya, tradisi ini hanya dilakukan oleh warga di kampong dengan membaca barzanji (sholawat) di masjid atau mushalla kampung. Lama kelamaan, warga semakin antusias untuk melaksanakan perayaan peringatan ini dengan cara melaksanakan sendiri-sendiri di musholla atau langgar pribadi. Perayaan *molod* secara eksklusif inipun lama kelamaan berkembang menjadi sebuah *tengka* sosial (tradisi yang mengikat setiap warga untuk melaksanakannya). Dari sini, tradisi pelaksanaan *molod* berkembang terus dengan pola saling undang mengundang antar warga, lengkap dengan terop, *sound system* serta hidangan serba mewah.

Tengka sosial ini dari segi ekonomi tampaknya lebih banyak menguntungkan kalangan elit keagamaan di Madura. Dalam hal ini, adalah kalangan kyai, ustadz dan lora-lora yang berada di puncak piramida hirarkhi sosial. Ada ungkapan di Madura, khususnya di daerah penelitian “*molodan ebheret namen sataon, panen dalem sabulen*” (ibarat menanam pohon setahun panen, maka waktu panennya adalah saat perayaan *molod*). Tidak mengherankan jika para kyai akan menghadiri undangan *molod* sehari sampai 30 kali undangan.

Sementara untuk kelas lora, hanya menghadiri undangan *molod* 20

kali, dan para ustadz menghadiri undangan *molod* sampai 15 kali dalam sehari. Seorang kyai yang cukup terkenal, akan mendapatkan *bis cabis molod* (amplop yang berisi uang) antara 2 juta sampai 3 juta perhari selama bulan maulid dan bahkan sesudah bulan maulid. Ia akan membawa pulang *bis cabis molod* tersebut yang kisaran nominalnya 100 sampai 150 ribu ditambah uang transport yang diperkirakan sendiri nominalnya oleh sang empunya hajat. Masyarakat memperkirakan sendiri nominal *bis cabis molod* yang diperuntukkan bagi Lora yang biasanya antara 25 ribu sampai 50 ribu rupiah, sementara untuk para ustadz yang diundang *molod* biasanya berkisar 10 ribu sampai 25 ribu rupiah.

Dari pengamatan lapangan terlihat bahwa, fenomena *tengka* sosial yang berupa perayaan *molod* ini bagi sebagian masyarakat yang mampu secara ekonomi, telah menjadi perayaan keagamaan yang *jung-jungan* (kompetisi untuk merayakan pelaksanaan *molod* semewah mungkin), mulai dari jumlah undangan yang sampai mencapai ribuan orang, menu hidangan yang dianggap mewah dalam jumlah besar, sampai kemampuan untuk mengundang kyai terkenal dari luar daerah.

Bagi orang Madura, khususnya di daerah penelitian, ada ungkapan; *todhus ka kanjeng guste mon pas aparloh kaangghuy kalahiren kanjeng guste se nyalamettaghi abe', pas ghi'kala raje etembhang aparlo kaangghuy urusen kamaloan*, (merasa malu sama kanjeng gusti Nabi Muhammad, kalau merayakan kelahiran beliau yang telah menyelamatkan diri ini, masih lebih meriah perayaan pernikahan yang hanya untuk urusan yang terkait dengan

kemaluan saja).

Akan tetapi, banyak juga masyarakat lokal yang kurang mampu secara ekonomi merasa bahwa perayaan *molod* yang *jung-jungan* (pamer) itu sangat memberatkan. Hal ini tercermin dari ungkapan orang-orang yang pernah bersimpati kepada kelompok Syi'ah,¹⁰ yaitu; “*anyamanan noro' ajarna ma'keh Tajul, modhe reggana*” (lebih baik mengikuti Islam ajaran Kyai Tajul, karena tidak memberatkan). Sehingga, banyak warga yang tertarik mengikuti ajaran Syi'ah ini, dan lambat laun mengubah ideologi / ajaran mereka menjadi penganut Syi'ah.

Bahkan, tidak jarang karena kewajiban melaksanakan *tengka* ini, banyak warga Nangkernang harus menjual tanah dan barang berharga lain demi bisa menggelar acara Maulid Nabi. Setelah perayaan *Molod* selesai yang tersisa hanyalah tumpukan utang. Komunitas Syi'ah mengubah tradisi itu dengan menggelar acara Maulid Nabi bersama di langgar dan tidak perlu digelar di masing-masing rumah warga. Warga cukup membawa hidangan semampunya untuk dimakan bersama.

Resistensi terhadap ajaran Syi'ah Tajul yang ingin merubah tradisi *molod* sangat tinggi khususnya dari kaum elit keagamaan di Sampang. Hal ini wajar saja, mode produksi *prebendal (bis cabis)* yang selama ini dinikmati oleh kalangan elit keagamaan tersebut terancam punah. Sehingga kalangan elit keagamaan di Madura berupaya sekuat mungkin mempertahankan tradisi *molod* yang setidaknya telah menyediakan dua macam *privilege*; pertama *privilege* materi yang diperoleh

¹⁰ Muksin, *Wawancara*, Sampang, 05 Januari 2014.

selama perhelatan tradisi *molod*; kedua, *privilege* kehormatan, yang diberikan sebagai bentuk *clientelism* masyarakat kepada kyai karena telah memainkan peran sebagai patron dalam semua aktivitas kehidupan orang Madura. Bagi elit keagamaan lokal Madura ajaran Syi'ah ala Tajul ini kalau menyebar dan diterima oleh masyarakat akan berakibat pupusnya dua macam *privilege* di atas, dan hal ini bisa berarti sebuah bencana terhadap eksistensi para elit keagamaan tersebut.

Sebagai akibat keluhan dan resistensi yang kuat terhadap ajaran Syi'ah Tajul ini, bukan hanya harta-benda yang harus jadi korbannya. Rasa kekeluargaan antar masyarakat yang merupakan modal sosial yang menjadi penopang perdamaian, juga hancur setelah para elit keagamaan sebagai aktor gerakan memobilisasi jemaahnya untuk membuat garis tegas antara muslim *versus* sesat, *ikhwan* versus *murtad*.

c. Faktor Pembingkai (*Framing*) Gerakan Protes

Dalam teori gerakan sosial hal yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana ide-ide secara sosial diciptakan, diatur, dan disebarluaskan. Dengan kata lain, penekanannya pada proses pembangunan wacana dan paket-paket ideasional yang dihasilkan. Suatu gerakan harus membingkai (*frame*) argumennya untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi.

Gerakan Islam lokal Madura misalnya, mereka menegaskan otoritas dirinya sebagai kelompok Sunni yang memegang teguh prinsip Islam yang benar, dan menyerang lawannya sebagai kelompok aliran sesat yang berupa Syi'ah. Terkadang, gerakan Islam melakukan *framing* tidak selalu menggunakan isu-isu Islam, tetapi bercampur dengan isu yang lebih luas, khususnya untuk mendapat

dukungan dari mereka yang mengharapkan terjadi perubahan dan transformasi sosial.

Pada pertengahan tahun 2005, KH. Ali Karrar Shinhaji memimpin inisiatif pengajian akbar di Desa Karang Gayam yang dihadiri oleh ribuan masyarakat dan para kyai dari Kecamatan Omben. Tampaknya forum pengajian ini memang digunakan sebagai 'deklarasi' menentang komunitas Syi'ah yang dipimpin oleh Tajul Muluk. Sejak itu, di kalangan masyarakat umum di wilayah Kecamatan Omben tersiar kabar bahwa di Desa Karang Gayam telah berkembang sebuah aliran sesat, yaitu Syi'ah yang dipimpin oleh kyai muda bernama Tajul Muluk. Upaya untuk melakukan upaya pembungkaman gerakan protes pun dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan label terhadap kelompok Syi'ah sebagai aliran sesat, dan forum penghakiman yang terjadi secara terus menerus sejak tahun 2006.

Berikut adalah rangkaian kejadian-kejadian penting terkait dengan upaya pembungkaman (*framing*) gerakan protes seperti penyesatan, syi'ar kebencian (*hate speech*), dan forum penghakiman, kepada Tajul Muluk dan komunitas Syi'ah di Sampang serta respon yang dilakukan pemerintah sejak 2006 sampai dengan akhir 2010 :

1. Pada 24 Februari 2006, atas inisiatif KH. Ali Karrar Shinhaji, sejumlah ulama dari beberapa tempat di Madura berkumpul di rumah almarhum H. Sya'bi dan mengundang Ustadz Tajul Muluk dengan agenda 'klarifikasi tuduhan sesat atas ajaran Syi'ah yang dibawa Tajul Muluk'. Pertemuan ini juga dihadiri H. Fadlilah Budiono, Bupati Sampang, dan juga Imron Rosyidi Kakankemenag

Sampang. Karena Tajul tidak hadir, maka pertemuan ini dilanjutkan pada 26 Februari 2006;

2. Pada 26 Februari 2006, sebagai kelanjutan dari pertemuan tgl 24 Ferbuari, sejumlah kyai yang kali ini diketuai Abd. Wahhab Adnan bersama dengan ketua MUI Sampang pada masa itu KH. Mubassyir dan Kapolsek Omben mengundang Tajul Muluk di Masjid Landeko' Karang Gayam di tempat kediaman kakek Tajul (Kyai Nawawi). Resminya pertemuan ini bernama Forum Musyawarah Ulama (FMU) Sampang-Pamekasan. Pertemuan ini dihadiri oleh semua yang hadir pada pertemuan 26 Februari 2006, mereka berkumpul kembali untuk mendengarkan jawaban Tajul Muluk. Tajul Muluk hadir dalam pertemuan ini menyatakan bahwa Syi'ah yang diajarkan tidak sesat, merupakan salah satu mahzab yang diakui dalam dunia Islam, dan dirinya tidak bersedia keluar dari Syi'ah. Karena tidak bisa merubah keyakinan Tajul, akhirnya FMU mengeluarkan keputusan yang isinya sebagai berikut: Mengajak pimpinan Syi'ah Ja'fariyyah (Tajul Muluk Makmun) untuk segera kembali ke jalan *Ahlu al-sunnah wa al-Jama'ah* dan sesepuh terdahulu untuk menghindari terjadinya bentrokan faham dan fisik di kalangan masyarakat awam yang sangat dikhawatirkan terjadi. Oleh karena Tajul Muluk telah menolak tawaran FMU tersebut, maka FMU tidak bertanggungjawab atas segala apa yang terjadi dan memasrahkan persoalan kepada aparat yang berwajib. FMU menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) empat kabupaten di Madura agar segera menyatakan fatwa tentang bahaya aliran-aliran sesat termasuk aliran Syi'ah yang meragukan keabsahan kitab suci al-

Qur'an, keadilan sahabat Nabi dan *berghuluw* (berlebih-lebihan) dalam *ahlu al-bait* (keluarga Nabi). Dalam daftar hadir pertemuan tertera empat puluh orang yang hadir. Diantaranya terdiri dari pimpinan pesantren, tokoh masyarakat, MUI Sampang, Kapolsek Omben dan tiga anggotanya. Sementara itu, pada hari yang sama di dusun Nangkernang ratusan bahkan ribuan massa mengepung dusun Nangkernang. Tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, namun ribuan massa tersebut melakukan aksi intimidasi terhadap warga dan mengepung rumah Tajul Muluk dan pesantren Misbahul Huda.¹¹

3. Pada 09 April 2007, Tajul Muluk bersama keluarga dan santri-santrinya akan mengadakan peringatan maulid Nabi yang dilaksanakan di rumahnya yang satu kompleks dengan pesantrennya. Dalam kegiatan maulidan ini turut diundang sejumlah ustadz dan *ikhwan Syi'ah*¹² dari luar Sampang. Belum lagi maulidan dimulai, ribuan massa dari beberapa desa yang bersenjata aneka ragam senjata tajam, kayu dan pentungan mengepung jalan masuk menuju Desa Karang Gayam dan melakukan penghadangan terhadap semua tamu undangan yang datang. Massa dengan teliti mengawasi dan memeriksa setiap kendaraan yang lewat, semua pengendara mobil yang melintas diwajibkan melambatkan laju kendaraannya. Untuk menghindari jatuhnya korban, sejumlah aparat dari Polres Sampang dan anggota TNI dikerahkan menjaga keamanan di sekitar rumah Tajul Muluk. Acara mauludan tetap dilaksanakan di bawah pengawasan dan penjagaan aparat keamanan.

¹¹ Lampiran *Risalah pertemuan FMU Sampang Pamekasan* (Forum Musyawarah Ulama), Pamekasan, 26 Februari 2006.

¹² *Ikhwan Syi'ah* adalah sebutan yang dipakai oleh jamaah Syi'ah dalam menyebut para teman-teman mereka sesama jamaah Syi'ah.

4. Di tengah-tengah meningkatnya ancaman terhadap komunitas Syi'ah di Sampang, pada Juni 2007, Tajul Muluk dan kedua saudaranya yaitu, Iklil al Milal dan Roisul Hukama diangkat sebagai Pengurus Daerah IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) Sampang. Tajul Muluk terpilih sebagai ketua.
5. Pada 17 September 2009, ratusan massa anti Syi'ah bergerak mengepung Nangkernang, di lain pihak, warga jamaah Syi'ah bersiap akan melawan. Kekerasan bisa dihindari, setelah aparat keamanan membubarkan massa. Kejadian ini dipicu oleh penolakan Tajul Muluk untuk menghadiri suatu pertemuan yang diinisiasi beberapa ulama. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka membahas keberatan para ulama atas keberadaan komunitas Syi'ah di Nangkernang.
6. Pada 26 Oktober 2009, dalam suasana bulan Ramadhan, PC NU Sampang mengadakan pertemuan bersama ulama dan Muspika Kecamatan Omben untuk membahas keberadaan akifitas dakwah Tajul Muluk dan jamaah Syi'ah di wilayah Kecamatan Omben. Pada intinya pertemuan ini adalah forum para ulama untuk menghakimi ajaran Syi'ah yang disebarkan oleh Tajul Muluk sebagai ajaran sesat. Dalam pertemuan ini Tajul Muluk diberikan sejumlah 32 pertanyaan tentang ajaran-ajaran Syi'ah yang dianggap sesat. Dalam keadaan terpojok, akhirnya Tajul Muluk menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa dirinya bersedia untuk menghentikan aktivitas mengajarkan ajaran Syi'ah di Sampang. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, PAKEM Kabupaten Sampang, MUI Kabupaten Sampang, Depag Kabupaten Sampang, PC NU

Sampang, Ulama dan tokoh masyarakat mengeluarkan surat bersama yang isinya :

- a. Bahwa Tajul Muluk tidak diperbolehkan lagi mengadakan ritual dan dakwah yang berkaitan dengan aliran Syi'ah karena sudah meresahkan warga.
- b. Bahwa Tajul Muluk bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran aliran tersebut di Kabupaten Sampang.
- c. Bahwa apabila tetap melakukan ritual dan / atau dakwah maka Tajul Muluk siap untuk diproses secara hukum yang berlaku.
- d. Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM di Kabupaten Sampang akan selalu memonitor dan mengawasi aliran tersebut.
- e. Bahwa Pakem, MUI, NU dan LSM siap untuk meredam gejolak masyarakat baik yang bersifat dialogis atau anarkis selama yang bersangkutan (Tajul Muluk) menaati kesepakatan di poin (1) dan (2).

Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh MUI Kabupaten Sampang, Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Ketua PCNU Kabupaten Sampang, Depag Kabupaten Sampang, KA Bakesbangpol Kabupaten Sampang serta tokoh Ulama' / Da'i Kamtibmas. Selanjutnya, surat pernyataan bersama ini menjadi legitimasi bagi pihak yang anti atas keberadaan jamaah Syi'ah di Karang Gayam dan Blu'uren untuk menyerang Tajul Muluk beserta pengikutnya dari desa mereka apabila menjalankan aktifitas keagamaan ajaran Syi'ah dan menyebarkan syi'ar kebencian di majelis pengajian, mushalla atau surau dan masjid. Akibatnya,

masyarakat di wilayah kedua desa ini terbelah menjadi dua pihak yang saling berhadapan. Di satu sisi adalah para pengikut ajaran Syi'ah dan keluarga mereka, dan disisi lain adalah warga Sunni dan keluarganya. Suasana di kedua desa ini telah berubah menjadi perang dingin yang setiap saat dapat meledak menjadi perang terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Sunni seringkali mencemooh warga Syi'ah, tidak menerima makanan pemberian mereka, ketika disapa tidak membalas, dan sebagainya. Adapula sampai terjadi perceraian diantara suami-istri karena suaminya mengikuti ajaran Syi'ah sedangkan istrinya tidak ikut.¹³

Di tengah-tengah gencarnya upaya pembungkai gerakan protes dengan cara menyebarkan syiar kebencian dan penyesatan atas ajaran Syi'ah oleh komunitas *civil society* Islam lokal, pada awal 2010 terjadi perselisihan keluarga antara Tajul Muluk dengan adiknya, Rais. Perselisihan ini disebabkan karena Tajul telah menikahkan Halima (16) dengan tetangganya tanpa sepengetahuan Rais, sedangkan Halima adalah santriwati yang berguru kepada Rais. Rais marah dan merasa tidak dihormati, karena sebagai guru Halima, seharusnya dialah yang menikahkan Halima, bukannya Tajul.

Belakangan diketahui bahwa kemarahan Rais bukan saja karena merasa tidak dihormati, tetapi Rais menaruh hati kepada Halima dan berencana akan menikahnya. Setelah kejadian ini, Rais sangat dendam dan memusuhi Tajul serta saudara-saudaranya yang lain yang mendukung Tajul termasuk sang ibu. Sejak peristiwa Halima, Rais menyatakan keluar dari Syi'ah, dan selanjutnya menjadi orang yang sangat antusias menyebarkan syiar kebencian, seruan permusuhan,

¹³ Rahman, tetangga dekat Tajul Muluk. *Wawancara*, Sampang, 08 Januari 2014.

issue tentang kesesatan dan bahaya dari ajaran Syi'ah. Rais pula yang dengan gencar menyerukan agar Tajul Muluk beserta murid-muridnya diusir dari Desa Karang Gayam. Dan akhirnya karena peranan Rais lah gerakan protes dan penyesatan atas komunitas Syi'ah di Karang Gayam mengalami eskalasi yang terus meningkat dan mengarah pada tindak kekerasan.

Sementara itu, Roisul Hukama sendiri membantah persoalan Syi'ah di Nangkernang belakangan ini disebabkan masalah pribadi. Ia menuding insiden pembakaran properti Syi'ah pada pengujung Desember 2011 lalu disebabkan sepak terjang Tajul sendiri. "Ia terlalu keras berdakwah sehingga merusak budaya warga Sunni yang mayoritas," "Metode dakwah Tajul keliru." Lebih Jauh, Rois mengatakan, metode dakwah yang dipakai Tajul terlalu keras dan tidak cocok diterapkan di Madura. Rois juga menjelaskan bahwa kebencian warga terhadap Tajul ini didasari fakta bahwa, Islam-Syi'ah yang dibawa Tajul ini telah merusak hubungan kekeluargaan antar warga Nangkernang.

Menurutnya, Syi'ah yang membuat ketegori antara ikhwan dan orang luar jelas merisaukan warga. Apalagi ditambahi klaim bahwa orang yang diluar Syi'ah itu adalah orang kafir dan murtad. Karena itu, dia merasa tidak bisa tanggung jawab ketika Tajul Muluk pulang akan meletus konflik antar warga. Bahwa yang menolak keberadaan Syi'ah di Nangkernang atau kepulangan Tajul Muluk bukan dia sendiri tapi warga masyarakat.¹⁴

Inilah alasan kenapa masyarakat Nangkernang menolak Tajul. Dia telah merusak kekeluargaan kami. Dakwahnya yang terlalu keras dan suka

¹⁴ Rois al-Hukama dan Halima (istri Rois), *Wawancara*, Sampang, 13 Januari 2014.

menyesatkan orang lain, ini jelas meyinggung warga. Jadi ini masalahnya, jangan ditarik karena masalah perempuan. Memang saya apaan, hanya gara-gara perempuan bisa memusuhi saudara saya sendiri, Itu jelas fitnah.”¹⁵

Lebih jauh, Rois Hukama mengaku sebenarnya juga sempat menjadi penyebar ajaran Syi’ah. Namun, lama-lama dia merasa banyak ajaran Syi’ah yang menyimpang sehingga dirinya kembali menjadi Nahdliyin. “Ajaran menyimpang seperti tidak harus patuh pada orang tua, hanya wajib patuh pada imam-imam Syi’ah yang mungkin menjadi salah satu penyebab amuk massa itu. Karena itu, Saya tidak bisa mencegah warga.”¹⁶

Pembingkaiian gerakan protes selama bertahun-tahun akhirnya dikristalisasi dalam sebuah keputusan resmi oleh Bakorpakem pasca meletusnya gerakan protes dengan kekerasan oleh komunitas Islam lokal Madura tanggal 29 Desember 2011. Pada hari Selasa, 10 Januari 2012, diadakan pertemuan antara Kuasa Hukum Tajul, Hadun Hadar, Rudi Setiadi dari Bakesbangpol Sampang dan Kapolres Sampang AKBP Solehan. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa karena tindakan hukum belum bisa dilakukan, maka yang diprioritaskan adalah perhitungan kemanusiaan.

Poin-poin penting kesepakatan itu antara lain; Pertama, semua *stakeholder* yang ada di Sampang harus ikut menandatangani surat kesepakatan damai dari mulai kelurahan hingga Bupati sebagai para-pihak yang bersepakat, dan berjanji tidak akan mengeluarkan *statement* yang bersikap provokatif dan bernada permusuhan. Kedua, jemaah Syi’ah akan dikembalikan ke rumah masing-

¹⁵ Rois al-Hukama, *Wawancara* Sampang, 27 Desember 2013.

¹⁶ Rois al-Hukama, *Wawancara* Sampang, 27 Desember 2013.

masing. Semua properti perumahan dan harta yang dibakar maupun dijarah akan diganti oleh Pemerintah Kabupaten. Ketiga, Ust Tajul, Ust. Ikhlil, Ust. Syaiful dan Ust. Ali tidak diperbolehkan kembali ke kampung dan sementara waktu akan tinggal di Hotel yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Dalam pertemuan ini LSM yang terdiri dari KontraS, Aman Indonesia, Mer-C dan kuasa hukum Tajul bertindak sebagai saksi. Menurut Rudi, opsi terakhir terpaksa diambil karena merupakan syarat utama masyarakat untuk dapat menerima waga Syi'ah kembali ke kampungnya.

Sehari berselang dibuatnya rancangan kesepakatan itu, pada hari Rabu 11 Januari 2012 Bakorpakem Sampang mengeluarkan keputusan yang menyatakan Syi'ah sesat dan keputusan ini dimuat secara eksklusif di Koran Radar Madura. Keputusan Bakorpakem ini jelas bertentangan dengan nota kesepakatan yang dibuat sehari sebelumnya di mana setiap para-pihak dilarang mengeluarkan pernyataan bermusuhan. Keputusan Tim Bakorpakem yang terdiri dari Polres Sampang, Dandim 0828, Bakesbangpol, Kemenag, Disbudparpora dan MUI didasarkan pada hasil penelitian Bakorpakem yang menemukan bahwa dalam Syi'ah terdapat ajaran Rukun iman ada lima, Rukun Islam ada delapan, dan shalat hanya tiga kali. Akibat *statement* yang dikeluarkan oleh Bakorpakem itu, situasi pun kembali labil. Tajul Muluk menganggap bahwa *statement* itu sama artinya dengan pengesahan atas tindak kekerasan terhadap pengikutnya di masa-masa berikutnya.

Sampai Kamis 12 Januari, tidak ada penjelasan dari pemerintah terkait pernyataan Bakorpakem. Tapi Kapolres ketika dihubungi bersedia

melakukan kesepakatan ulang pada siang pukul 10:00 terkait proses pemulangan pengungsi dan perlindungan bagi mereka. Tapi sampai pukul 11:00 tidak ada konfirmasi dari Kapolres, ketika dihubungi, Kapolres menyatakan menunda pertemuan ini karena dirinya harus mengawal demonstrasi penolakan relokasi Pasar yang tempatnya bersebelahan dengan GOR Sampang. Kapolres menjanjikan akan menjadwalkan pertemuan pada pukul 12:00. Sampai dengan pukul 12:30 Kapolres tidak juga menghubungi.

Sekitar pukul 13.00, tanpa pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba sejumlah pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Sampang dengan dikawal Petugas Satpol PP dan Polisi datang ke dalam GOR Sampang. Abd. Halim Toha dari Kemenag Sampang melalui alat pengeras suara sambil berkaca pinggang dan menggunakan bahasa Madura, menginstruksikan agar pengungsi segera meninggalkan GOR Sampang karena situasi di Nangkernang sudah aman dan dalam waktu dekat GOR Sampang akan digunakan untuk kegiatan perlombaan tenis menyambut hari jadi ke-388 Kabupaten Sampang.

Selain itu, kata Halim,¹⁷ walaupun masyarakat Sunni di Nangkernang bersedia menerima keberadaan warga Syi'ah, tetapi keempat pemimpin Syi'ah yaitu Tajul Muluk, Iklil, Syaiful, dan Ali tidak boleh menyertai mereka. Ketika Hadun Hadar, kuasa hukum Tajul memprotes tindakan Abd Halim, ia mengatakan, bagi pihak yang tidak terima dipersilahkan datang ke kantornya. Dia juga mengatakan, 'Saya ini Depag, orang yang paling tahu masalah agama di Sampang. Siapapun anda tidak dapat menghalangi'. Sampai beberapa saat

¹⁷ Hadun Hadar, Ketua Tim pembela kasus Sunni Syi'ah Sampang, *Wawancara* Sampang, 11 Januari 2014.

pengungsi sempat bertahan, tapi usaha mereka tidak berarti apa-apa karena rombongan Satpol PP langsung masuk Gedung dan menggulung semua tikar dan karpet yang menjadi alas tidur pengungsi. Keadaan menjadi panik, banyak anak-anak menjerit menangis karena ketakutan.

Merespon tindakan Abdul Halim dan petugas Satpol PP, Tajul Muluk menyeru kepada jemaahnya, 'Sudah tidak ada hukum di Sampang ini. Ini seperti Karbala. *Labaika Ya sayyidina Husein.*' Dia tegaskan bahwa dirinya siap mati menghadapi ribuan massa yang dikabarkan telah berjaga-jaga untuk menghadang dan membunuhnya jika memaksa tetap pulang ke Dusun Nangkernang. Sesampai di luar GOR, meski disana sudah ada mobil satpol PP yang siap mengangkut mereka, namun warga Syi'ah menolak menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten tersebut. Pengungsi memilih menunggu sampai sekitar 3 jam untuk menunggu truk sewaan dari relawan Surabaya.

Akhirnya pukul 16:00 tujuh truk pun datang. Ketika rombongan pengungsi akan berangkat, Wakapolres Sampang kembali mengingatkan agar Tajul Muluk dan ketiga ustadz lainnya tidak ikut serta pulang. Wakapolres dan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten menegaskan bahwa ribuan massa telah siap menghadang apabila Tajul dan ketiga ustad yang lain ikut pulang. Selama satu jam terjadi diskusi yang dramatik. Beberapa orang sampai menangis untuk meyakinkan Tajul agar dirinya tidak ikut pulang karena resikonya adalah kematian, sementara dirinya masih sangat dibutuhkan oleh murid dan jemaahnya.

Dengan berat hati, akhirnya Tajul dan ketiga ustad yang lain beserta keluarganya tidak ikut kembali pulang. Pada sekitar pukul 17:30 WIB, rombongan pengungsi berangkat menuju Desa Karang Gayam. Dengan diguyur hujan lebat pada saat perjalanan, pengungsi Syi'ah mendapat cemoohan dan sorakan dari masyarakat Sunni lainnya tahanan pulang dari penjara. Sebuah isyarat bahwa konflik Syi'ah-Sunni masih jauh dari penyelesaian. Sementara itu, Tajul dan ketiga ustad yang lain beserta keluarganya pada malam itu diinapkan oleh pemerintah di Hotel Trunojoyo. Karena merasa tidak leluasa dibawah penjagaan polres dan seolah menjadi tahanan rumah, akhirnya pada Jumat, 13 Januari ketiga keluarga tersebut meninggalkan Madura dan untuk sementara waktu memilih tinggal di Malang.

Pada akhirnya, pembungkahan gerakan protes yang dilakukan terus menerus oleh para ulama anti Syi'ah menjadi sebuah tuntutan yang mengerucut pada dua opsi, komunitas Syi'ah harus keluar dari desanya atau harus keluar dari ajaran Syi'ah dan berpindah ke Sunni.

Bak gayung bersambut tuntutan para tokoh gerakan protes bukan hanya mendapatkan momentum kesempatan politik, tapi bahkan mendapat persetujuan dan dukungan politik baik dari pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Propinsi, maupun politik secara nasional. Dalam konflik Syi'ah - Sunni, pemerintah Kabupaten Sampang lebih memprioritaskan aspirasi kelompok mayoritas Sunni, sehingga opini yang berkembang di kalangan kelompok Syi'ah, pemerintah (termasuk kepolisian) justru melegitimasi tuntutan dan gerakan protes yang dilakukan mayoritas ulama Sunni Sampang atas komunitas Syi'ah.

d. Faktor Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure*)

Menurut Dela Porta dan Mario Diani¹⁸, konsep *political opportunity structure* sangat relevan untuk membangun gerakan sosial karena dapat menjelaskan bahwa peluang politik yang terbuka akan mendorong kelompok-kelompok gerakan sosial untuk memanfaatkannya sebagai ruang untuk melakukan tekanan atau mendesak agenda-agenda gerakan agar dapat mencapai tujuan gerakan sosialnya. Bahkan, tidak hanya peluang politik di tingkat lokal dan nasional, melainkan terbukanya peluang politik di tingkat internasional pun ikut mendorong muncul dan meluasnya gerakan sosial. Gerakan protes akan efektif apabila terdapat kesempatan politik yang mendukung.

Dalam kasus di Sampang ini, struktur kesempatan politik bisa berwujud dukungan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang diambil, di mana lebih cenderung memprioritaskan aspirasi kelompok pemrotes. Kesempatan politik tersebut dapat dilihat dari kronologi peristiwa penanganan konflik yang terjadi baik sebelum terjadinya gerakan protes seperti yang dipaparkan di atas terkait dengan keluhan sosial maupun setelah terjadinya gerakan protes 29 Desember 2011. Hal ini mengirimkan pesan kepada massa anti Syi'ah, bahwa gerakan protes tersebut mendapatkan momentum yang baik secara politik, karena massa Islam lokal merasa, bahwa pemerintah dalam hal ini aparat keamanan, membiarkan terjadinya struktur politik yang mendorong terjadinya aksi protes dengan kekerasan terhadap kelompok Syi'ah.

Selang sehari, 30 Desember 2011, Pemerintah Kabupaten, DPRD,

¹⁸ Periksa lebih detail dalam Dela Porta, Donatella & Mario Diani, *Sosial Movements An Introduction*, (United Kingdom: Blackwell Publisher Inc, 1988), 9.

seluruh aparat kemanan, MUI, PC NU Sampang dan MUI Jatim langsung melakukan koordinasi terkait solusi konflik di Sampang itu. Pada saat itu, Bupati Sampang, Noer Tjahja menjelaskan bahwa pemicu kekerasan massa adalah masalah keluarga di mana salah satunya terbukti menistakan agama sebagaimana dikatakan MUI Sampang. Kedepan, Pemerintah Kabupaten berencana akan memilah-milah semua jemaah Syi'ah dalam kategori fanatik dan tidak.

Untuk yang fanatik, rencananya akan ditransmigrasikan ke luar pulau Madura. Tindakan ini diambil Pemerintah Kabupaten dengan alasan bahwa Kepala Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang telah menyatakan bahwa bila ada penangkapan terhadap pelaku pembakaran, masyarakat siap perang sampai mati. Kebijakan ini bukan hanya diamini *stakeholder* lokal, bahkan Pemerintah Propinsi Jatim, melalui Wakil Gubernur, Saifullah Yusuf menawarkan solusi relokasi bagi penganut Syi'ah itu dari pulau Madura dan tidak bermasyarakat dengan warga lain yang berbeda paham keagamaan.

Setelah rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten itu dilakukan, secara beruntun rapat-rapat sejenis juga dilakukan hampir semua lembaga keagamaan di Sampang. Pada prinsipnya, semua rapat-rapat itu bertujuan untuk menemukan dasar hukum bahwa Tajul Muluk memang menistakan agama. Dalam rapat internal MUI Sampang tanggal 1 Januari 2012 atau rapat PC NU yang dilakukan pada tanggal 2 Januari misalnya, keduanya memutuskan bahwa ajaran yang dibawa Tajul Muluk dinilai sebagai penodaan agama dan penistaan agama yang menimbulkan keresahan warga. Karena itu, bagi MUI dan PC NU Sampang, pelaku penyebaran ajaran sesat dan

menyestakan itu atau Tajul Muluk harus dihadapkan di pengadilan. Kekerasan yang terjadi pada 29 Desember 2011 itu terjadi bukan lantaran Sunni yang bertindak radikal, itu hanyalah akibat dari keresahan atas penyebaran ajaran Syi'ah Tajul.

Akibatnya, setelah semua pihak pemerintah dan tokoh keagamaan di Sampang satu kata mengatakan bahwa Tajul Muluk melakukan penodaan agama dan sebagai pihak yang bersalah, persepsi masyarakat Sampang pun mengikutinya. Hampir semua orang di Sampang mengatakan bahwa orang-orang Syi'ah yang mengungsi di GOR adalah penjahat agama, sehingga bantuan untuk pengungsi memang tidak layak untuk diberikan. Alih-alih, bantuan- bantuan yang datang malah dinilai akan memanjakan pengungsi yang jelas bersalah.

Karena itulah, meski sejak hari pertama, Jumat 30 Desember warga Syi'ah harus mengungsi di GOR dan mengalami keterbatasan logistik seperti ketiadaan dapur umum, bahan makanan, ketiadaan tenaga medis, buruknya air dan sanitasi, serta ketiadaan pendampingan psikososial untuk anak dan kelompok perempuan, namun bantuan dari luar sengaja dipersulit masuk lokasi untuk disalurkan langsung kepada para pengungsi. Tidak hanya harus diteliti dan diinterogasi terlebih dulu oleh petugas keamanan, setiap bantuan diharuskan memiliki ijin Kepala BPBD.

Menurut laporan sebuah LSM Jaringan Solidaritas Kemanusiaan (Jauzan)¹⁹ dari mulai awal, hingga warga Syi'ah direlokasi dari GOR pada tanggal 12 Januari 2012, pihaknya masih merasa kesulitan untuk menyalurkan

¹⁹ *Laporan akhir Investigasi Jauzan*, Sampang 20 April 2012.

bantuan. Bahkan mereka terpaksa harus menitipkan bantuan ke toko-toko sekitar GOR dan warga disuruh mengambilnya sendiri. Tujuannya selain untuk mengurangi kecurigaan polisi, dan juga agar dinilai bahwa barang-barang itu memang dibeli warga sendiri. Hampir setiap hari, selalu saja warga mendapat teror dari Pemerintah Kabupaten setempat untuk sesegera mungkin meninggalkan GOR dan pulang ke rumah masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Sampang beranggapan bahwa keberadaan pengungsi itu memberatkan, terutama karena harus mengeluarkan 14 juta setiap harinya untuk memberi makan pengungsi. Bagi Pemerintah Kabupaten, keberadaan pengungsi selain menambah beban anggaran karena harus menyediakan 800 bungkus nasi (300 untuk pengungsi dan 400 untuk Satpol PP dan Polisi), juga dinilai bisa mengundang perhatian pihak luar sementara Pemerintah lokal menginginkan persolan ini dilokalisir. Inilah yang menjadi alasan kenapa Pemerintah Kabupaten selalu mempersulit bantuan luar masuk. Bantuan yang masuk dinilai akan semakin memanjakan pengungsi sehingga mereka tetap menolak untuk dipulangkan ke kampung halamannya.

Sebenarnya, Tajul Muluk dan jemaah Syi'ah tidak berkeinginan untuk tetap bertahan di GOR. Tapi sebelum ada kepastian jaminan keamanan dan pelaku pembakaran ditangkap, mereka dengan tegas menyatakan menolak meninggalkan pengungsian, jika tidak demikian, maka bentuk-bentuk aksi yang sama akan terus terjadi di masa mendatang. Selain itu, Tajul Muluk juga menginginkan situasi ini didengar secara nasional bahwa ini merupakan pelanggaran HAM. Diskriminasi yang mereka terima memang berasal dari

paham Syi'ah mereka yang disesatkan, bukan karena konflik keluarga sebagaimana selama ini dituduhkan.

Sebuah kebijakan yang diambil Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang masih dianggap kredibel, bahkan memberikan kesan turut andil dalam menciptakan struktur kesempatan politik. Komnas HAM yang diwakili Kabul Supriadi dan Hesti Armi Wulan sebenarnya juga telah turun dan meninjau langsung kondisi pengungsi, tapi tampaknya tidak ada langkah serius yang diambil guna merespons kekerasan yang dialami penganut aliran Syi'ah Sampang itu. Hesti Armiwulan selaku Kepala Sub Penyuluhan dan Pendidikan yang mengunjungi GOR pada Rabu, 4 Januari 2011 malah meminta dan membujuk semua pengungsi untuk bersedia direlokasi.

Pasca Komnas HAM meninggalkan Sampang, tekanan terhadap warga Syi'ah di pengungsian justru makin kuat. Seolah mendapat legitimasi, Polres dan Bakesbangpol Sampang sangat aktif melakukan desakan agar pengungsi meninggalkan GOR. Opsinya kembali ke Kecamatan Omben atau kembali ke Dusun Nangkrenang.

Meski begitu, Tajul Muluk dan jamaahnya tetap bersikeras bertahan di GOR sebelum massa yang menjadi pelaku pembakaran ditangkap. Menurut Tajul, tanpa penangkapan pelaku, tidak mungkin ada jaminan keamanan. Sebab, jika pelaku tetap dibiarkan maka ke depan tindakan kekerasan yang sama juga pasti akan berulang. Dua hari setelah kejadian, sebenarnya polisi menyatakan telah menangkap seorang tersangka, yaitu Muslika, warga Desa Karang Gayam. Namun seketika itu, warga Syi'ah menegaskan bahwa mereka

kenal semua warga sedesa dan kenal siapa saja yang membakar rumahnya. Nama Muslika yang disebut tersangka oleh polisi itu tidak dikenal warga.

Kesempatan politik yang mendorong timbulnya gerakan protes lebih lanjut bisa dilihat dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi ketegasan warga Syi'ah, yang kemudian dibalas Pemerintah Kabupaten dengan teror bahwa bantuan makanan akan dihentikan. Dengan alasan keberatan menanggung pengungsi yang telah lima hari tinggal di GOR, stok makanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten lewat Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Sampang rencana akan dihentikan. Tapi untungnya ancaman itu tidak terbukti. Meski terlambat, bantuan makanan tetap diberikan kepada para pengungsi. Bedanya, jika dulu penanganan pengungsi Syi'ah di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten langsung, mulai Kamis, 5 Januari 2012 diambil alih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang.

Wujud lain dari kesempatan politik tidak hanya melalui teror penghentian bantuan makanan, Pada Kamis, 5 Januari 2012, pukul 17.30 WIB, seorang pengungsi yang bernama Jemali mengaku baru saja dipaksa ikut ke Kantor Polres. dengan menggunakan mobil patroli. Kapolres Sampang, AKBP Solehan meminta Jemali untuk membujuk jamaah Syi'ah agar mau pulang ke Nangkernang.

AKBP Solehan²⁰ menjelaskan bahwa GOR yang ditempati pengungsi akan dipergunakan untuk rapat pada tanggal 12 Januari 2012. Belakangan diketahui bahwa gencarnya usaha mengusir jamaah Syi'ah dari GOR

²⁰ AKBP Solehan Kapolres Sampang ketika itu, *Laporan Investigasi AMAN*, Sampang, 2012.

Sampang terkait dengan rencana peringatan HUT Pemerintah Kabupaten Sampang. Pengungsi harus meninggalkan GOR Sampang maksimal sampai tanggal 12 Januari 2012. GOR akan digunakan sebagai lomba tenis Indoor yang menjadi bagian acara HUT Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Januari. Teror yang diterima warga pengungsi tidak berhenti disitu, tanpa alasan yang jelas, Jumat, 6 Januari 2012, empat kamar mandi semi permanen di bagian luar GOR Sampang mulai dibongkar oleh BPBD dan Bakesbangpol Sampang. Bahkan mulai hari itu bantuan stok air bersih untuk kebutuhan MCK sudah dihentikan. Sebelum bantuan Air dari Jauzan pada Sabtu pagi datang, pengungsi terpaksa melakukan MCK dengan air sungai yang ada di belakang GOR.

Bagi para pengungsi semua itu, dianggap merupakan teror agar pengungsi meninggalkan GOR. Sama seperti Tajul dan warga lainnya, Iklil Milal sendiri berulang kali menegaskan tidak akan meninggalkan GOR selama polisi tidak memberi jaminan keamanan. Jaminan keamanan yang dimaksud warga, Polisi menangkap pelaku pembakaran dan memprosesnya secara hukum. Selama tuntutan ini tidak dipenuhi, para pengungsi dengan tegas akan tetap bertahan di pengungsian.

Meski begitu, pada saat bersamaan, sebenarnya Iklil juga meragukan komitmen polisi untuk memberikan jaminan keamanan. Dengan penjagaan ketat sekitar 300-an personel polisi, harta benda warga Syi'ah yang ditinggal di kampung masih saja tak luput dari penjarahan maling. Penjarahan dilakukan terhadap rumah Pak Ulul, salah satu warga Syi'ah. Bukan hanya isi toko yang

diambil, tetapi juga KTP, STNK, Akta Kelahiran, dan BPKB.

Di tempat terpisah, mendengar sikap tegas warga Syi'ah tersebut, Pemerintah Kabupaten balik mengatakan bahwa jika ingin tetap bertahan, maka itu dibiarkan saja sesuai keinginan pengungsi. Tapi bantuan tidak akan diberikan lagi. Untuk kondisi pengungsi dan solusinya, Pemerintah Kabupaten menyerahkan semua ke hukum alam. Menurut Pemerintah Kabupaten, Warga Karang Gayam sendiri sebenarnya mau menerima pengungsi Syi'ah, asal empat orang pemimpin Syi'ah yang berada di pengungsian tidak ikut kembali ke Karang Gayam. Empat pemimpin Syi'ah itu adalah Ustad Tajul Muluk, Ustad Iklil Milal, Ustad Syaiful, dan Ustad Ali sekeluarga tidak pulang. Menurut warga Karang Gayam, mereka dianggap sebagai sebab dan biang keladi kekerasan.²¹

Sebaliknya, dalam menjawab syarat-syarat yang diajukan oleh pengungsi, Polisi sendiri menjelaskan bahwa tuntutan jaminan keamanan itu sulit dipenuhi. Pasalnya, para pelaku merupakan preman yang menjadi penguasa Madura. Jika ditangkap, kelompok paramiliter tradisional ini akan membuat Madura berkobar. Bahkan menurut Polisi penjaga GOR, yang bisa dilakukan adalah pemberlakuan hukum transaksional. Pelaku akan ditangkap, tapi pada saat bersamaan Ustadz Tajul juga akan dikriminalkan dengan tuduhan melakukan penyesatan agama dan mengganggu ketertiban umum.²²

Sampai hari kesembilan, Sabtu 7 Januari 2012, belum juga ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik Sunni-Syi'ah ini. Ancaman dan

²¹ Hadun Hadar, Tim Pembela Kasus Sunni Syi'ah *Wawancara* Sampang tanggal 11 Januari 2014.

²² *Laporan investigasi KontraS*, April 2012,

teror yang dilakukan pemerintah tidak juga berhenti. Selama dua hari terakhir, paling tidak Tajul Muluk sudah dua kali diajak mediasi dengan Polres dan Bakesbangpol Sampang terkait relokasi pengungsi. Pertemuan pertama diadakan sekitar pukul 22:30 WIB dan pertemuan kedua diadakan sekitar pukul 15:30 WIB. Pertemuan pertama tidak menghasilkan apa-apa, sementara pertemuan kedua Polres menyatakan dengan tegas memaksa untuk tetap merelokasi, paling lambat Senin, 9 Januari 2012. Jika warga Syi'ah tetap ngotot bertahan, dengan terpaksa Pemerintah Kabupaten akan melakukan evakuasi secara paksa.

Usaha Pemerintah untuk membujuk warga Syi'ah agar mau dipulangkan berlanjut esok harinya, Minggu 8 Januari. Sekitar pukul sembilan pagi, satu rombongan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bakesbangpol dan Polres secara bersama-sama datang ke GOR untuk meminta Tajul Muluk agar mau dipulangkan. Bahkan aparat sudah mempersiapkan satu truk untuk mengangkut pengungsi. Pilihannya ada dua, jika tidak mau dipulangkan ke Nangkernang, warga Syi'ah akan diungsikan di Kecamatan Omben. Namun karena sampai jam 10:00 WIB negosiasi antara Tajul dan aparat pemerintah buntu, akhirnya evakuasi tidak jadi dilakukan pada hari itu.

Situasi berubah drastis pada sore harinya. Tepat habis Maghrib, beredar isu akan ada penyerangan sekitar tiga ribuan massa ke GOR. Massa yang berumpul di Omben itu berupaya mendesak Polres Sampang agar menangguk penahanan salah seorang tersangka pembakaran yang bernama Asifin. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, setelah membakar Polres, massa berencana akan meneruskan aksinya ke GOR tempat warga Syi'ah mengungsi.

Menghadapi teror itu, habis Maghrib, semua pengungsi secara berulang-ulang membaca sholawat, "*Allahumma solli ala muhammad, wa ala ali muhammad.*" Meski demikian, tidak ada sedikitpun ketakutan yang terlihat dari wajah jamaah Syi'ah. Mereka selalu berucap, "kenapa harus takut mati, ini kan ajaran Husein dan ajaran Islam untuk memperjuangkan aqidah."

Sampai pukul 20:00 WIB massa tidak juga datang. Dua jam kemudian tersiar kabar bahwa polisi telah melepaskan pelaku dengan alasan salah tangkap. Dengan perasaan kecewa melihat aparat keamanan yang mudah ditundukkan itu, Tajul pun mengatakan, "ke depan situasinya pasti akan lebih buruk kalau seperti ini, ini bukti kalau polisi dengan mudah ditundukkan oleh massa. Tapi, bagaimanapun pelaku harus ditangkap, kita butuh kepastian hukum."²³

Berbeda dengan Tajul, Iklil malah mengatakan, jika polisi sudah tidak mampu untuk menangkap pelaku dan menjamin rasa aman pada warganya, barangkali solusi yang tepat adalah dengan mendatangkan TNI untuk menyelesaikan kasus ini. Menurutnya, kestabilan di Sampang hanya mungkin terjadi jika Sampang menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) seperti di Aceh.²⁴

Karena situasi semakin tidak menentu di mana pihak Sunni dan Syi'ah sama-sama ngotot dengan pendiriannya, akhirnya pada Selasa, 10 Januari 2012, dimulailah kesepakatan baru. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh kuasa hukum Syi'ah, Hadun Hadar, Rudi Setiadi dari Bakesbangpol Sampang dan Solehan-

²³ *Laporan investigasi AMAN* Surabaya, 20 Desember 2013.

²⁴ Ridwan, *Wawancara* Sampang, 06 Januari 2014.

Kapolres disepakati bahwa akibat tindakan hukum belum bisa dilakukan, maka yang diprioritaskan adalah perhitungan kemanusiaan. Poin-poin penting kesepakatan itu antara lain; Pertama, semua *stakeholder* yang ada di Sampang harus ikut menandatangani surat kesepakatan damai dari mulai kelurahan hingga Bupati sebagai para-pihak yang terkait dan berjanji tidak akan mengulurkan statement yang bersikap provokatif dan bernada permusuhan.

Sementara LSM dan Advokat sebagai saksi. Kedua, jemaah Syi'ah akan dikembalikan ke rumah masing-masing. Semua properti perumahan dan harta yang dibakar maupun dijarah akan diganti oleh Pemerintah Kabupaten. Ketiga, Tajul dan kakaknya, Iklil, sementara waktu akan tinggal di Hotel Pemerintah Kabupaten. Opsi terakhir terpaksa diambil karena syarat utama masyarakat untuk dapat menerima warga Syi'ah kembali ke kampungnya adalah dengan tanpa mengikutsertakan, Ust. Tajul, Ust. Iklil, Ust. Syaiful dan Ust. Ali. Mendengar pernyataan tersebut Tajul hanya tersenyum. Kemudian dia pun mengatakan "beginilah masyarakat Madura itu, pokoknya tidak! Malah mereka juga sering bilang, karena terlanjur malu karena telah menghujat faham Syi'ah yang belum terbukti kesesatannya, mati kafir pun tidak apa-apa."²⁵

Sebenarnya, sikap warga terhadap Tajul Muluk sendiri terkesan mendua. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa Tajul Muluk itu sebenarnya baik kepada masyarakat, tapi untuk masalah keagamaan mereka tidak bisa menerimanya. Pernyataan masyarakat Nangkernang itu lebih tegas dikatakan oleh Muhammad

²⁵ *Laporan investigasi Kontras*, April 2012.

Nur,²⁶ bekas wakil ponpes Tajul yang kembali ke Sunni. Dia mengatakan bahwa, sebenarnya Tajul dan santrinya diperbolehkan untuk kembali ke Nangkernang, hanya saja mereka harus menjadi Sunni dulu.

Kebijakan pemerintah yang mengirimkan pesan jelas bagi terciptanya struktur kesempatan politik sehingga berakibat pada terjadinya gerakan protes adalah keluarnya keputusan dari Tim Bakorpakem Sampang yang menyatakan Syi'ah sesat pada hari berikutnya, Rabu 11 Januari 2012. Selain sebagai upaya kristalisasi pembersihan gerakan, keputusan tim Bakorpakem ini, yang paling utama, merupakan suatu kesempatan politik bagi terciptanya aksi sosial karena diputuskan semua elemen *civil society* bersama-sama pemerintah sebagai pemegang otoritas.

Bagi warga Syi'ah kebijakan itu jelas melanggar nota kesepakatan yang dibuat sehari sebelumnya, di mana setiap para-pihak dilarang mengeluarkan pernyataan bermusuhan. Tim Bakorpakem yang terdiri dari Polres Sampang, Dandim 0828, Bakesbangpol, Kemenag, Disbudparpora dan MUI yang bertindak sebagai penasihat memutuskan ajaran Syi'ah Tajul Muluk sesat.

Dasar penyesatan yang dituduhkan kepada Syi'ah itu antara lain adalah; Rukun iman ada lima, Rukun Islam ada delapan, shalat hanya tiga kali. Akibat statement yang dikeluarkan oleh Bakorpakem itu, situasi pun kembali labil. Tajul Muluk sendiri menyatakan bahwa *statement* itu sama artinya dengan pengesahan terhadap tindak kekerasan terhadap pengikutnya di masa-masa berikutnya. Kesepakatan yang dibuat antar-lembaga yang tergabung dalam Tim

²⁶ Muhammad Nur, *Wawancara*. Sampang, 02 Desember 2013.

Bakorpakem itu tentu tidak dengan mudah diklarifikasi kembali.

Karena itu, Tajul memprediksikan situasi stagnan ini akan bertahan lama. Malahan, Tajul berkeinginan untuk mengklarifikasi dan membalas tuduhan dari Bakorpakem tersebut. Tapi, setelah dinasehati oleh Kuasa Hukumnya, bahwa klarifikasinya malah akan memperkeruh konflik dan membuat suasana semakin kacau, akhirnya Tajul Muluk pun melunak dan mengurungkan niatnya.²⁷

Sebaliknya, warga yang sudah bersiap-siap meninggalkan lokasi, terpaksa harus mengeluarkan barang-barang yang sudah mereka kemasi sebelumnya. Dengan perasaan kecewa mereka malah berkeinginan untuk kembali ke kampungnya tanpa perlu difasilitasi ataupun dimediasi pemerintah. Kalaupun ada penyerangan dari massa Sunni saat mereka tiba di kampung halaman, mereka siap melakukan perlawanan untuk itu, bahkan jika harus mati.

Berbeda dengan sikap pengungsi dan Tajul, Hadun dengan yakin mengatakan, meski bukan resolusi konflik secara total, resolusi dan pemulangan jamaah akan bisa tercapai dalam waktu dekat. "Tinggal menunggu klarifikasi dari Polres dan kita lihat besok pagi seperti apa." Berdasarkan alasan inilah, dia meminta tiga NGO, AMAN Indonesia, KontraS dan Mer-C yang masih mendampingi pengungsi diminta untuk tidak pulang dulu. Diharapkan jika kesepakatan telah tercapai, tiga NGO ini mampu berperan untuk melakukan monitoring dan pengawasan atas perjanjian damai yang difasilitasi oleh Bakesbangpol tersebut.

²⁷ Keputusan Bakorpakem ini seakan menjawab keluhan sosial Islam lokal Sunni mengenai kesesatan Syi'ah, sehingga seakan memberikan landasan legal formal bagi berlangsungnya aksi protes dengan strategi kekerasan.

Pada hari itu, menurut seorang informan bernama Ridlo,²⁸ memang hampir semua relawan lokal mulai tidak terlihat; tenda darurat PMI sudah dibongkar, Tagana tidak lagi membagikan makanan, terakhir adalah KAS (Komite Anak Sampang) juga pamit. Alasan KAS untuk meninggalkan lokasi karena bantuan pendidikan kepada anak-anak pengungsi yang selama ini mereka berikan dilarang oleh Pemerintah Kabupaten setempat.

Terakhir, personel Polisi dan Satpol PP yang biasa berjaga di GOR juga sudah tidak terlihat lagi. Hanya mobil kosong dengan plat Polres Sampang yang nampak diparkir di depan GOR. Sampai Kamis 12 Januari 2012, ternyata klarifikasi atas pernyataan Bakorpakem itu juga tidak dilakukan. Tapi Polres bersedia melakukan kesepakatan ulang pada pagi itu juga. Kesepakatan yang rencananya diagendakan pukul 10:00 WIB itu terpaksa ditunda dua jam karena waktu itu masih ada demonstrasi penolakan relokasi Pasar yang tempatnya bersebelahan dengan GOR.

Kejadian ini juga menegaskan bahwa dukungan politik bagi gerakan protes di Desa Karang Gayam sudah sangat terang benderang. Kejadian pada hari Kamis 12 Januari 2012, sebagaimana dalam analisa pemingkalian gerakan protes di atas, semakin memperkuat sebuah fakta, bahwa bukan hanya kesempatan politik yang tersedia bagi terciptanya gerakan protes di Kabupaten Sampang, melainkan dukungan politik baik lokal, regional, bahkan nasional yang sengaja diberikan.

Sampai pukul 12:00 WIB menjelang, polisi tidak juga menghubungi.

²⁸ Ridlo, *Wawancara* Sampang, 07 Januari 2014.

Tepat 15 menit sebelum rencana keberangkatan ke Polres dilakukan, tanpa pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba tim Bupati datang ke pungungsian. Dengan memakai logat Madura, Abd. Halim dari Depag Sampang seketika menginstruksikan pengungsi untuk meninggalkan Lokasi GOR saat itu juga. Dia menjelaskan kepada masyarakat bahwa situasi di Nangkernang sudah aman. Pemulangan harus dilakukan, karena dalam waktu dekat GOR Sampang akan digunakan untuk kegiatan perlombaan tenis menyambut hari jadi ke-388 Kabupaten Sampang. Selain itu, kata Halim, masyarakat Sunni di Nangkerang sudah mau menerima keberadaan warga Syi'ah, kecuali keempat pemimpinnya.

Pengungsi Syi'ah yang merasa dikhiniati sempat beberapa saat mengajak Pemerintah Kabupaten untuk berunding. Tapi bukan perundingan yang terjadi, malah perkelahian antara Abd Halim dan Kuasa Hukum warga Syi'ah, Hadun Hadar hampir terjadi. Pasalnya, Abd Halim menolak berunding dan malah mengatakan, bagi pihak yang tidak terima dipersilahkan datang ke kantornya. Dia juga mengatakan, "Saya ini Depag, orang yang paling tahu masalah agama di Sampang . Siapapun anda tidak dapat menghalangi."

Sampai beberapa saat pengungsi sempat bertahan di dalam GOR, tapi usaha mereka tidak berarti apa-apa karena rombongan Satpol PP langsung masuk GOR dan menggulung semua alas tidur pengungsi. Melihat kejadian, perempuan dan anak yang sebagian masih tertidur, hanya terdiam dan nampak kebingungan.

Merasa dipaksa dan sudah tidak diizinkan lagi tinggal di GOR, akhirnya dengan tegas Tajul Muluk menyeru kepada jemaahnya, "Kalau pemerintah sudah mengusir, kenapa kita harus bertahan. Sudah tidak ada hukum di

Sampang ini. Ini Karbala. *Labbaika Ya Sayyidana Husein.*” Dia pun bersiap mati untuk menghadapi ribuan massa yang dikabarkan telah berjaga-jaga untuk menghadang dan membakar Tajul hidup-hidup jika memaksa tetap pulang ke Dusun Nangkernang.

Sesampai di luar GOR, meski disana sudah ada mobil satpol PP yang siap mengangkut mereka, namun warga Syi’ah menolak menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten tersebut. Pengungsi memilih menunggu sampai 4 jam lebih hanya untuk menunggu truk sewaan relawan dari Surabaya. Akhirnya pukul 16: 00. WIB tujuh truk pun datang. Tapi tidak berhenti disitu. Tajul Muluk dan ketiga ustadz lainnya tidak ingin meninggalkan jemaahnya sendirian dan ngotot ingin pulang serta menghadapi Massa Sunni di Nangkernang sampai mati. Setelah, hampir satu jam lebih dibujuk oleh relawan bahwa kepulangannya akan menimbulkan konflik yang lebih luas, akhirnya dia mau mengurungkan niatnya terlebih dulu. Haru tangis dan rasa kesedihan meluap di antara jemaah saat melepas Tajul Muluk.

Akhirnya sekitar pukul 17:30 WIB, Ust. Tajul mengikuti saran Polres untuk ikut mereka dulu, sedangkan jemaah pulang ke kampungnya masing-masing. Sementara jemaah Syi’ah lainya pulang ke Nengkernang dengan dikawal tiga mobil polisi. Sesampai dilokasi, ternyata janji Abd Halim bahwa masyarakat Nangkernang menerima pengungsi tidak terbukti. Dengan diguyur hujan lebat pada saat perjalanan, sesampai di kampung halamannya dengan kondisi listrik padam, pengungsi Syi’ah mendapat cemoohan dan sorakan dari masyarakat sunni bak tahanan pulang dari penjara. Pasca kejadian itu, Keluarga

Tajul Muluk dan Iklil sempat diungsikan ke Hotel Trunojoyo. Karena merasa tidak leluasa dibawah penjagaan polres dan merasa menjadi tahanan rumah, akhirnya pada Jumat, 13 Januari kedua keluarga tersebut meninggalkan Madura dan untuk sementara waktu memilih tinggal di Malang.

Setelah evakuasi pada Kamis, 12 Januari itu, warga Syi'ah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluúran, Kecamatan Karang Penang tetap mendapat ancaman kekerasan dan teror. Hubungan antar warga Syi'ah dan Sunni tetap tidak harmonis dan seolah tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Ini tidak hanya terjadi antar warga jauh, bahkan sesama tetangga belakang rumah. Orang sunni di Nangkernang menyebut penganut Syi'ah memiliki agama yang berbeda, bukan faham kegamaan yang berbeda. Dan agama yang dibawa Tajul Muluk, menurut para kyai sebagaimana dituturkan warga, bisa mengancam keberadaan paham *ahlu sunnah waljamaah* di kampung itu.

Pasca kejadian itu, pernah dilakukan upaya mediasi dengan difasilitasi Komnas HAM pada Senin, 16 Januari 2012 di Ubaya, Surabaya. Alih-alih mampu menghasilkan draft kesepakatan damai yang menguntungkan dua pihak sebagaimana yang sempat tertunda pada minggu sebelumnya, pertemuan tertutup yang dihadiri para kyai dari pihak Rois, IJABI dan ABI dari pihak Tajul ini malah menjadi ajang pembantaian bagi Tajul Muluk dan ajarannya. Secara bergiliran para kyai itu mengatakan bahwa Tajul Muluk jelas-jelas melakukan penistaan agama sebagaimana diatur dalam UU NO. 1/PNPS/65. Tajul juga dinilai telah melanggar Al-Quran dan Hadits yang dipercayai umat

Islam di Indonesia.

Tidak hanya ada di level atas, di level masyarakat juga merasa permusuhan antara warga Sunni dan Syi'ah itu semakin menguat. Berbagai selebaran gelap tentang penyesatan setiap hari diedarkan kepada masyarakat. Dan rasa permusuhan ini menemukan momentumnya pada Selasa, 17 Januari 2012. Sekelompok massa dengan menggunakan senjata tajam berupaya mendekati pemukiman kelompok Islam Syi'ah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang. Alasannya, Syaiful Ulum, salah satu ustadz pesantren Tajul Muluk yang dilarang kembali ke Kampung, demi alasan keluarga nekat datang ke dusun Nangkernang. Kehadiran Syaiful ini di Nangkernang pada Selasa petang jelas memicu amarah warga Sunni. Mereka ngotot untuk menemukan Saiful dan membakarnya hidup-hidup.

Sebaliknya, meski sudah santer terdengar bahwa warga Sunni sudah siap melakukan protes dengan kekerasan, Syaiful tetap bersikeras bertahan di Nangkernang. Bujuk dan rayuan dari tim pendamping korban, tidak digubrisnya sama sekali. Syaiful tetap ngotot bertahan dan akan menghadapi massa penyerang. "Pergi ataupun bertahan situasinya tetap sama. mereka tetap akan menyerang kami."²⁹ Pada waktu itu, Jamaah Syi'ah di Nangkernang juga nampak tulus dan bertekad bulat mendukung sikap ustadnya itu. Sambil membawa parang dan celurit, hampir semalaman mereka rela begadang untuk berjaga-jaga jika massa tiba-tiba menyerang.

Setelah Saiful Ulum meninggalkan Nangkernang pada Rabu pagi, 18

²⁹ Abdullah, mantan santri ust.Saiful. *Wawancara* Sampang, 06 Januari 2014.

Januari, sore harinya Tim polisi gabungan Polda Jatim, Polres Sampang, dan Polres Pamekasan melakukan penyisiran terhadap senjata tajam milik warga Syi'ah. Sebanyak 23 senjata tajam berupa celurit, parang, dan tombak ditemukan di semak-semak dekat rumah warga Syi'ah. Warga Syi'ah merasa tidak terima dan cemburu karena hanya senjata warga Syi'ah yang disita, dengan marah mereka mengatakan“ kenapa hanya senjata kami yang dirampas, kenapa punya orang Sunni tidak?”

Melihat situasi yang kembali tidak stabil, akhirnya pada Kamis, 19 Januari, para kyai, pemerintah kabupaten dan aparat Sampang berkumpul untuk membahas konflik di Nangkernang itu. Tapi semua pihak yang hadir di pendopo Kabupaten Sampang secara aklamatif mengatakan bahwa, jika masyarakat tetap menuntut adanya pelaku kerusuhan, maka sebagai gantinya Tajul Muluk harus menjalani proses hukum juga dengan tuduhan penodaan agama. Bakorpakem Sampang bahkan meminta bantuan kyai untuk mengumpulkan saksi-saksi yang bisa memberatkan pidana Tajul, bahkan jika perlu harus diambilkan dari luar Sampang untuk melengkapi berkasnya. Tidak hanya itu, dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa konflik di Nangkernang hanya bisa diselesaikan jika warga Syi'ah kembali ke Sunni. Karena itu, dalam pertemuan juga dipersiapkan semacam surat penandatanganan perpindahan paham keagamaan kepada warga Syi'ah. Surat ini rencananya akan diberikan pada warga setelah sholat Jumat esok harinya.

Memang benar, habis sholat Jumat, empat warga Syi'ah dengan dikawal Roisul Hukama diantarkan ke Polres untuk menandatangani surat perjanjian

untuk kembali Sunni tersebut. Atas desakan aparat dan Rois, jika ingin kembali hidup damai dan kembali rukun dengan masyarakat harus keluar dari Syi'ah, akhirnya keempat warga itu pun menandatangani surat tersebut.

Terlepas dari itu semua, sampai kini, anak-anak Syi'ah belum kembali ke sekolah. Di satu sisi, mereka takut keluar rumah karena mendapat intimidasi dari kelompok anti Syi'ah, sementara di sisi lain, seragam sekolah mereka ikut terbakar pada insiden 29 Desember 2011 lalu. Selain itu, sekolahan mereka, SD Karang Gayam 04 juga berdekatan dengan Pondok pesantren Rois Hukama, adik kandung Tajul yang selama ini paling getol memusuhi Syi'ah.

Tidak hanya anak-anak, intimidasi dan rasa trauma juga dialami para ibu-ibu. Mereka merasa ketakutan dipenjara karena memiliki paham keagamaan yang berbeda. Harapan ibu-ibu untuk berdamai dengan saudara dan tetangganya terpaksa diurungkan karena pengajian yang isinya menyebarkan kebencian pada warga Syi'ah semakin marak di kampungnya.

Setelah berbeda paham keagamaan dan terutama pasca relokasi ke GOR, meski saudara, kedua kelompok ibu-ibu berbeda paham ini tidak saling menyapa. Salah seorang ibu dari kelompok Sunni pernah menceritakan, dulu sebelum saudaranya masuk Syi'ah hubungan mereka baik-baik saja. Kalau bertemu saling menyapa, dulu mereka aktif juga dalam kegiatan masyarakat ; ikut pengajian seperti muslimatan setiap minggunya, tapi setelah ikut Syi'ah tidak lagi mengikuti pengajian bahkan tidak mau kumpul kalau ada hajatan keluarga seperti maulidan atau acara tasyakuran keluarga, atau *holngehole* (merayakan selamatan untuk keluarga yang sudah mati cukup lama).

Sebaliknya, ibu-ibu dari kelompok Syi'ah mengatakan bahwa karena masyarakat menganggap Syi'ah berlainan aqidah, semua akhirnya membenci. Karena menganggap satu sama lain berbeda aqidah, disengaja atau tidak mereka akhirnya saling menyisahkan kelompoknya masing-masing.

Di luar itu semua, kedua kelompok perempuan ini sebenarnya masih memiliki harapan untuk bisa berdamai dan rukun dengan tetangga yang juga masih bersaudara itu. Tapi keinginan itu nampaknya harus tertahan karena tidak mungkin dilakukan mereka sendiri. Secara pribadi, kedua kelompok perempuan ini sama-sama merasakan takut untuk memulainya. Perempuan Sunni merasa takut karena orang Islam Sunni yang dari luar daerah sini lebih besar. Sementara perempuan Syi'ah takut dipenjara, lantaran upaya yang ia lakukan bisa dinilai sebagai penyebaran ajaran Syi'ah yang dinilai sesat.

3. Mobilisasi Struktur

Gerakan sosial itu “bermain” di ranah Masyarakat sipil (*civil society*) yang merupakan arena bagi gerakan sosial, di samping dapat pula menjadi arena hegemoni negara. Gerakan sosial yang merupakan himpunan dari berbagai organisasi gerakan sosial atau aliansi dari berbagai organisasi gerakan sosial seperti gerakan lingkungan, gerakan hak asasi manusia, gerakan perempuan senantiasa berupaya memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi dalam menghadapi negara. Dalam kaitan ini, organisasi gerakan sosial tentu saja dapat melakukan perubahan sosial melalui arena masyarakat sipil.

Mobilisasi struktur itu dapat diartikan sebagai “kendaraan” untuk melakukan mobilisasi orang-orang lain untuk menjadi partisipan aksi-kolektif,

atau mengajak orang lain agar dapat berpartisipasi di dalam aksi kolektif. Mobilisasi struktur ini dapat dilakukan pada kelompok-kelompok lapisan bawah, organisasi-organisasi, dan jaringan informal guna membangun blok kolektif dari gerakan sosial dan revolusi.

Mobilisasi struktur ini sangat menentukan baik dalam membangun maupun meraih tujuan dari gerakan sosial. Artinya, meski peluang politik terbuka dan dapat mendorong gerakan sosial semakin membesar, tetapi kondisi ini akan menjadi sia-sia bila aktor atau agen tidak mampu memobilisasi massa. Di sisi lain, organisasi pun harus mempunyai struktur yang mudah untuk dimobilisasi. Dalam gerakan organisasi sosial kerap menggunakan organisasi rakyat, maka struktur organisasi rakyat ini harus memberikan ruang untuk memudahkan aktor atau agen melakukan mobilisasi, sehingga agenda gerakan membuahkan hasil

Upaya untuk memobilisasi struktur terjadi seiring dengan keluhan dan keresahan masyarakat Desa Karang Gayam. Segera setelah para aktor gerakan yang terdiri dari elit-elit keagamaan lokal ini, merasa eksistensi mereka sudah terancam, dengan semakin membesarnya kelompok Syi'ah, dan tersedia sebuah dukungan politik, mereka memobilisir massa dalam jumlah besar untuk melakukan gerakan protes dengan strategi memakai kekerasan. koordinator-koordinator lapangan dibentuk dari kalangan alumni santri dari pesantren Dárut Tauhid Proppo, maupun alumni pesantren Dárul Ulúm Gersempal Omben.

Pola patron-klien dalam hubungan kyai-santri di Madura, memudahkan agen-agen aksi protes ini untuk menggerakkan massa dalam jumlah besar hanya dalam waktu yang singkat. Mobilisasi struktur ini terjadi secara sistematis, mulai

dari pengajian-pengajian umum, penggunaan struktur musholla sebagai sarana mobilisasi massa, ritual selamat atau *kolomman* dengan intensitas yang tinggi, sampai penggunaan alat komunikasi canggih seperti *handphone*.

Sarana-sarana mobilisasi struktur tidak hanya terbatas pada struktur sosial dalam skala mikro seperti musholla dan pengajian umum maupun ritual selamat atau *kolomman* dengan intensitas yang tinggi, namun juga melibatkan kelompok organisasi-organisasi masyarakat sipil baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil ini turut andil dalam memobilisasi massa sehingga lebih memudahkan agen-agen aksi protes untuk mencapai tujuannya. Dalam kasus gerakan protes Islam lokal Desa Karang Gayam Sampang ini, beberapa Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terlibat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang, Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Sampang, Badan Silaturahmi Ulama Se-Madura (BASSRA), serta Forum Musyawarah Ulama Sampang-Pamekasan (FMU).

Organisasi-organisasi masyarakat sipil tersebut memainkan peran mobilisasi baik secara vertical maupun horizontal. Secara vertikal, organisasi masyarakat sipil ini membantu gerakan protes dalam menghadapi pemerintah dalam hal ini pihak keamanan. Di samping itu, membantu pula dalam memproduksi wacana-wacana yang bisa menjadi legitimasi terjadinya gerakan protes oleh massa di akar rumput (*grass root*).

Dalam konteks sosio-politik Madura,³⁰ para kyai dan ulama pada umumnya adalah para tokoh masyarakat yang memiliki basis massa patron klien yang kuat. Tidak ada tokoh formal maupun tokoh informal yang memiliki pengaruh melebihi dari pengaruh para kyai, dan para ulama atau kyai di Madura (termasuk Sampang) pada umumnya adalah pengikut ajaran Islam Sunni yang jelas berbeda dengan ajaran Syi'ah. Artinya, dukungan kyai adalah jaminan bagi setiap politisi di Madura untuk memenangkan kontestasi politik di daerahnya. Karena itulah, Bupati dan politisi Sampang cenderung mengamini segala sikap dan tuntutan para kyai.

Faktor inilah yang menjadi penegasan mengapa organisasi masyarakat sipil yang aktor-aktornya tidak lain adalah para kyai mempunyai peran yang signifikan secara vertikal berhadapan dengan Pemerintah Kabupaten Sampang yang dalam hal ini adalah pihak keamanan. Posisi tawar (*bargaining power*) yang signifikan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi para aktor gerakan protes dalam upaya memobilisasi massa.

Adapun peran secara horizontal, organisasi ini menjadi wadah para aktor-aktor gerakan untuk merancang dan memobilisir sebanyak mungkin massa pemrotes. Di samping itu, meyakinkan massa bahwa gerakan-gerakan protes yang dilakukan walaupun harus memakai sarana kekerasan adalah legal dan legitimate baik secara agama (Islam) maupun secara budaya (Madura).

Sebagai contoh, MUI Kabupaten Sampang mengeluarkan Fatwa Nomor: A-035/MUI/Spq/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyesatkan kelompok

³⁰ Latif Wiyata, pengamat budaya Madura. *Wawancara*, Bangkalan, 20 Desember 2013.

Syi'ah. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang menyatakan sikap dengan surat Nomor: 255/PC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dibacakan dan disampaikan pada acara silaturahmi Kapolda Jawa Timur dengan Forpimda, MUI Jatim, MUI Kabupaten Sampang, Ulama, dan Tokoh masyarakat. Surat tersebut berisi dukungan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Sampang. PCNU Kabupaten Sampang juga menerbitkan Kartu Kelompok Anak Ranting (Kartu Anggota NU) seluruh Sampang untuk membedakan kelompok Syi'ah dan Sunni.

4. Strategi Gerakan: Protes dengan Kekerasan (*Violence*)

Gerakan sosial dalam mencapai tujuannya membutuhkan pula inovasi tindakan kolektif (*innovative collective action*). Konsep ini berkaitan dengan pilihan strategi aksi dalam mencapai tujuan gerakan sosial. Di dalam strategi inovasi kolektif ini terdapat dua strategi besar. *Pertama*, apakah aktor atau *agents* akan menggunakan cara-cara kekerasan (*violence*) di dalam mencapai tujuannya, atau sebaliknya aktor dan agen akan menggunakan cara-cara nir-kekerasan (*non-violence*). *Kedua*, apakah aktor dan agen akan mengkombinasikan antara cara-cara kekerasan dengan cara-cara tanpa kekerasan guna mencapai tujuan gerakan social.³¹

Menurut Gamson,³² kelompok-kelompok gerakan yang menggunakan strategi aksi “kekuatan dan kekerasan” terhadap para penentangannya cenderung lebih berhasil daripada kelompok-kelompok yang tidak menggunakan pilihan

³¹ Lihat dalam Charles Tilly, Doug McAdam & Tarrow. *The Dynamic of Contentious*, (Cambridge: Cambridge University Press. 2002), 33.

³² Periksa lebih lanjut dalam, Gamson William. *The Strategy of Social Protest*, (2nd edition). (Baltimore: wordworth. 1990), 322.

strategi aksi dengan kekerasan. Namun, pilihan strategi aksi tanpa kekerasan ada juga yang membuahkan hasil seperti gerakan sosial di India yang dipelopori Mahatma Gandhi ketika menentang dominasi kekuasaan Inggris.

Begitu pula dengan gerakan rakyat Philipina yang dikenal dengan *people power* dalam menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos. Strategi aksi tanpa kekerasan pun menjadi pilihan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa Indonesia ketika menjatuhkan Presiden Soeharto.

a. Gerakan Protes Tanggal 29 Desember 2011

Kelompok Islam lokal yang tergabung dalam beberapa elemen *civil society* seperti NU, MUI, BASSRA dan FMU Sampang-Pamekasan, menggunakan strategi gerakan protes dengan kekerasan. Pilihan strategi ini didasarkan pertimbangan rasional; bahwa gerakan protes dengan kekerasan dirasa akan berlangsung lebih efektif dan berhasil dalam mencapai tujuan gerakan; yaitu menentang keberadaan kelompok ideologi Syi'ah dari Desa Karang Gayam Sampang. Berikut adalah rangkaian kejadian gerakan protes Islam lokal Sunni yang berakhir dengan terusirnya kelompok Syi'ah Tajul Muluk dari Desa Karang Gayam:

Pada 21 Pebruari 2011, Tajul Muluk beserta jama'ahnya mengadakan peringatan Maulid Nabi di pesantrennya. Seperti kejadian pada tahun 2007, ribuan massa menutup dan merusak jalan masuk menuju Desa Karang Gayam. Kali ini salah satu pelopor penggerak massa penyerang adalah Raisul Hukama. Jumlah massa mencapai ribuan, menurut keterangan Rais di salah satu media,

massa berasal dari 5 desa di sekitar Karang Gayam, yaitu Desa Soko Banah, Desa Ketapang, Desa Karang Penang, Desa Blu'uran, Desa Tlambah.

Dalam peristiwa ini BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama Madura) menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengerahan massa. Bassra mengeluarkan tuntutan agar Tajul Muluk menghentikan aktifitas mengajarkan Syi'ah dan berpindah ke ajaran Sunni dan apabila Tajul Muluk tidak bersedia maka Tajul Muluk harus keluar dari Madura. Sejumlah aparat keamanan dikerahkan menjaga kediaman Tajul Muluk. Sementara itu, untuk melegitimasi tuntutannya, ulama-ulama di Kecamatan Omben memobilisasi pengumpulan tanda tangan masyarakat untuk menyatakan petisi penolakan terhadap komunitas Syi'ah di Omben. Adapun isi dari petisi adalah:

1. Tajul Muluk keluar dari Desa Karang Gayam dan meninggalkan wilayah Kabupaten Sampang.
2. Tajul Muluk dilarang menyebarkan ajarannya.
3. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka Tajul Muluk akan diusir secara paksa oleh masyarakat Desa Karang Gayam

Pada 2 April 2011, ratusan massa kembali bergerak menuju rumah dan pesantren Tajul, mereka menuntut Tajul harus keluar dari Desa Karang gayam, atau rumah dan pesantrennya akan dibakar. Merespon tuntutan massa dan dengan alasan keamanan, Polres Sampang memutuskan membawa dan mengamankan Tajul Muluk ke kantor Polres Sampang. Pada awalnya Tajul menolak, tetapi karena Polres tidak bisa memberikan jaminan keamanan

terhadap keluarga dan murid-muridnya, maka dengan terpaksa Tajul bersedia diamankan di Kantor Polres Sampang.

Berdasarkan runtutan kronologis yang dicatat oleh Kesbang Kabupaten Sampang, untuk merespon situasi di Karang Gayam yang semakin memburuk Pemerintah Kabupaten Sampang telah mengadakan serangkaian pertemuan-pertemuan sebagai berikut:

Pada 4 April 2011, Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan rapat koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sampang. Rapat ini dipimpin oleh Bupati Sampang dan diikuti Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang, Muspika Kecamatan Omben, Muspika Kecamatan Karang Penang, tokoh agama dan masyarakat (kyai/ulama) dan masyarakat di sekitar Desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran. Di dalam pertemuan tersebut pemerintah mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang menolak ajaran Tajul Muluk dan memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Akan merelokasi Tajul Muluk beserta keluarga untuk sementara waktu keluar dari Desa Karang Gayam Kecamatan Omben demi kondusifitasnya situasi di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben.
- 2) Akan dilakukan upaya-upaya pendekatan terhadap Rois al Hukama dan pengikutnya serta masyarakat Karang Gayam Kecamatan Omben dan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang untuk dapatnya menahan diri agar tidak terseret konflik horizontal yang bernuansa SARA.

Pada 5 April 2011 sekitar pukul 09.00 WIB, diadakan pertemuan antara Kapolda Jawa Timur (Irjen Pol Untung S. Rajab) dengan ulama se-kabupaten Sampang untuk menemukan solusi dalam persoalan Syi'ah di Sampang. Dalam pertemuan tersebut para ulama menyampaikan tuntutan mereka agar pihak Kepolisian mendukung rencana merelokasi Tajul Muluk keluar dari Desa Karang Gayam.

Pada 7 April 2011 pukul 13.00, diadakan rapat koordinasi Kominda Kab Sampang yang dipimpin Wakil Bupati Sampang. Dalam pertemuan tersebut di hadir oleh ketua MUI Kabupaten Sampang (Buchori Ma'shum), tokoh agama dari Kecamatan Omben (Wadud Bahri, Abd. Wahab dan Lud), Halim Toha dari Kemenag Kabupaten Sampang, ketua DPRD Sampang (Imam Ubaidillah), Dandim 0828 Sampang, Wakapolres Sampang beserta jajarannya, Kejari Sampang, Bakesbangpol Sampang beserta jajarannya, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Sampang, Muspika Kecamatan Omben, Kasat C Sosbud Polda Jatim, Kasat D kriminal Polda Jatim, Intel Brimob Polda Jatim. Pertemuan ini menghasilkan keputusan: Tajul Muluk akan segera direlokasi keluar dari Desa Karang Gayam Kecamatan Omben (beberapa peserta rapat meminta agar Tajul Muluk dikeluarkan dari wilayah Pulau Madura).

Pada 10 April 2011 bertempat di rumah dinas camat Omben, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang, Muspika Omben dan Karang Penang, H. Wadud (kakek Tajul Muluk), Rais al Hukama, H. Lutfi, Kades Karang Gayam, tokoh ulama dan masyarakat Karang Gayam dan Desa Blu'uran membahas tentang keberadaan aktifitas dakwah Tajul Muluk. Dalam pertemuan ini beberapa tokoh agama tersebut

menyatakan penolakan atas keberadaan komunitas Syi'ah yang dipimpin Tajul Muluk dan mendesak pemerintah agar melarang aktifitas dakwah Tajul Muluk.

Pada 11 April 2011 pukul 09.00 para ulama mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Darul Ulum di Desa Gersempal Kecamatan Omben. Pesantren ini dipimpin oleh KH. Syafiudin Abd.Wahid. Dalam pertemuan itu, dihadiri oleh para pejabat Kabupaten Sampang dan Kapolres Sampang.

Hasil pertemuan adalah: (1.) Polres menyatakan dukungannya atas rekomendasi ulama Sampang untuk merelokasi Tajul Muluk keluar dari pulau Madura dengan alasan untuk menjaga kondusifnya situasi keamanan di Madura. (2.) Masyarakat tidak diperkenankan melakukan tindakan anarkis dan dianjurkan melakukan pendekatan persuasif kepada pengikut ajaran Tajul Muluk. (3.) Kepada semua pihak diharapkan untuk bekerja sesuai dengan kewenangannya demi menjaga kondisi yang stabil.³³

Pada tanggal 11 April 2011, pada pukul 19.00 WIB, diadakan pertemuan antara pengurus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pengurus IJABI Wilayah Jatim bertempat di hotel AGIS Surabaya. Pertemuan dihadiri oleh : Asisten I dan III Setprov Jawa Timur, Polda Jawa Timur, Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sampang, Bakesbangpol kabupaten Sidoarjo, Polres Sampang, Pengurus pusat, pengurus wilayah Jawa Timur, pengurus Kabupaten Sampang Ikatan Ahlul Bait Indonesia (IJABI), dan K. Tajul Muluk dan Iklil serta dua orang jama'ahnya.

³³ Sementara itu, di media massa, Bupati Sampang menyatakan bahwa pemerintah telah siap untuk merelokasi seluruh Jamaah Syi'ah untuk keluar dari Pulau Madura. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Gubernur Provinsi Jawa Timur (pernyataan tanggal 14 April 2011).

Pertemuan ini menghasilkan beberapa pemahaman sebagai berikut: Pertama, Pemerintah berpandangan bahwa konflik agama di Sampang dilatar belakangi oleh masalah keluarga antara Tajul dan Rois, karena itu pemerintah meminta IJABI untuk mendamaikan Tajul Muluk dan Rois karena keduanya masih tercatat sebagai pengurus Syi'ah IJABI Kabupaten Sampang. Kedua, pemerintah meminta agar IJABI mendukung rencana untuk merelokasi sementara waktu Tajul Muluk beserta keluarga ke kabupaten Malang (rumah mertua K. Tajul Muluk) selama setidaknya satu tahun sampai dengan situasi agak mereda. Dalam hal ini IJABI menyetujui rencana tersebut.³⁴

Pada 30 April 2011 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang dilaksanakan pertemuan antara Asisten I Pemerintah Propinsi Jawa Timur, pengurus IJABI Jawa Timur dan Tajul Muluk. Dalam pertemuan ini Asisten I Pemerintah Propinsi Jawa Timur menyatakan akan mengganti biaya sewa rumah senilai Rp 10.000.000 dan biaya hidup selama satu tahun yang nilainya masih belum ditentukan.³⁵

Sejak tanggal 2 April 2011 Tajul telah keluar dari Desa Karang Gayam, dan untuk sementara waktu Polres Sampang menempatkan dirinya di rumah dinas Wakapolres Sampang. Tajul seolah telah menjadi tahanan rumah Polisi yang kemana-mana mendapat pengawasan dari petugas Polres Sampang. Karena tidak ada kejelasan penyelesaian masalah dari pihak pemerintah, dan tidak nyaman diperlakukan layaknya tahanan rumah, akhirnya pada 16 April 2011,

³⁴ Pemerintah selalu berusaha mengecilkan persoalan ini hanya pada persoalan keluarga saja, yaitu persoalan antara Tajul dan Rais

³⁵ Pemerintah Kabupaten Sampang memberikan bantuan sebesar Rp 10.000.000,- bantuan diserahkan pada 8 Agustus 2011 dan Pemerintah Propinsi Jatim menyerahkan bantuan sejumlah sebesar Rp 60.000.000,- juta rupiah yang diserahkan pada 15 Agustus 2011.

Tajul memutuskan untuk pergi ke kota Malang. Kota Malang dipilih karena di kota ini dia memiliki banyak kerabat dan teman. Tentu saja pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Sampang sangat setuju dan mendukung pilihan Tajul. Dukungan itu ditunjukkan dengan rencana Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang akan mengalokasikan anggaran biaya hidup bagi Tajul Muluk selama satu tahun.

Setelah aktor-aktor gerakan protes ini berhasil mengusir Tajul dari desanya, para ulama bersama pemerintah melakukan konsolidasi dan pertemuan-pertemuan untuk mewujudkan tujuan gerakan protes berikutnya, yaitu; melegitimasi penyesatan ajaran Syi'ah, dan melikuidasi para pengikut Syi'ah. Berikut adalah pertemuan-pertemuan pasca diusirnya Tajul : 1.) Pada 25 Mei 2011 di rumah Kades Karang gayam diadakan pertemuan antara Bakesbangpol Sampang, Muspika Kecamatan Omben dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Karang Gayam membahas kondisi Desa Karang Gayam pasca terusirnya Tajul Muluk.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mensosialisasikan dua hal: pertama, Terciptanya situasi kondusif di Desa Karang Gayam. Kedua, Masyarakat dapat menahan diri karena Tajul Muluk telah diupayakan untuk tinggal di Malang selama satu tahun. 2). Pada 28 Mei 2011 di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempal Omben, diadakan pertemuan ulama se-Madura.

Pada intinya, pertemuan ini membahas tentang Petisi bulan Pebruari 2011 yang telah ditandatangani ribuan warga Sampang. Petisi berisi tentang pengusiran Tajul Muluk dari Pulau Madura dan upaya pelarangan atas penyebaran ajaran Syi'ah. Selain dihadiri para Ulama (terutama anggota BASSRA), hadir juga

pejabat Muspida Sampang, Polda Jatim, Mabes Polri dan Slamet Effendi Yusuf mewakili MUI Pusat. Dalam pertemuan ini para Ulama yang hadir mengeluarkan beberapa rekomendasi: (1.) Mendesak MUI se-Madura untuk menyatakan aliran Syi'ah di Karang Gayam sebagai ajaran Islam yang sesat dan menyesatkan. (2.) Menuntut agar Tajul Muluk dan pengikutnya direlokasi segera dari Sampang. (3.) Menuntut pemerintah agar melarang segala aktivitas keagamaan pengikut ajaran Syi'ah Imamiyah yang ada di Desa Karang Gayam.

Pada 30 Mei 2011 diadakan pertemuan antara Asisten I Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Bakesbangpol Propinsi Jatim, Dinas Sosial Propinsi Jatim, Ketua MUI Jawa Timur, Sekda Kabupaten Sampang, Bakesbangpol Sampang, Dandim 0828 Sampang, Kasat Intel Polres Sampang, Muspika Omben, Ketua MUI Sampang, Kakankemenag Kabupaten Sampang. Hasil pertemuan ini adalah sebagai berikut: (1.) Pemerintah Propinsi siap memfasilitasi anggaran relokasi Tajul Muluk dari Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ke Dieng Malang. (2.) Pemerintah Kabupaten Sampang secara teknis untuk melakukan pendekatan kepada Tajul Muluk guna penandatanganan berita acara relokasi ke perumahan Lembah Dieng Kota Malang.

Pada awal bulan Juli 2011, Tajul mendapat informasi bahwa situasi di Karang Gayam telah kembali normal dan hal ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk kembali pulang. Maka pada 24 Juli 2011 dia pulang ke Karang Gayam. Berita kepulangan Tajul segera diketahui masyarakat di sekitarnya, dan keesokan harinya pada 26 Juli 2011, ratusan massa kembali mengepung kediaman Tajul Muluk dan mengancam akan membakar rumah itu.

Akhirnya, untuk yang kedua kali Tajul Muluk kembali diamankan oleh petugas Polres Sampang. Dan seperti pada kejadian sebelumnya, Tajul kembali ditempatkan di kantor Polres Sampang layaknya tahanan rumah. Karena khawatir Tajul akan ditahan oleh polisi, sekitar seratus warga Syi'ah Sampang pada 28 Juli 2011 datang ke Kantor Polres Sampang dan menuntut kepada Polisi agar Tajul diijinkan pulang bersama mereka ke Karang Gayam. Tentu saja pihak Polres Sampang tidak mengijinkan tuntutan tersebut, bahkan para pejabat Polres Sampang menegaskan tidak akan dapat mengendalikan keamanan Desa Karang Gayam apabila Tajul kembali kesana. Akhirnya, Tajul membatalkan niatnya pulang ke Karang Gayam dan demi keselamatan jamaah Syi'ah di Desa Karang Gayam dia memutuskan kembali lagi ke Malang.

Selama di pengasingan petugas polisi selalu mengawasi gerak-geriknya dan memastikan bahwa dia benar-benar tidak pulang ke desa. Suatu hari, pada 7 Agustus 2011, dalam bulan Ramadan, Tajul diam-diam pulang ke desa untuk merayakan awal Ramadhan bersama keluarga. Rupanya petugas polisi mengetahui hal ini, dan keesokan harinya sejumlah petugas Polisi menjemput dan mengantarnya keluar desa.

Puncak gerakan protes kalangan Islam lokal Sunni terjadi pada hari Kamis 29 Desember 2011 WIB, Pesantren Misbahul Huda yang menjadi pusat keagamaan warga Syi'ah di dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura dibakar massa hingga rata dengan tanah. Akibat pembakaran massa yang mengaku dari kelompok *ahlus sunnah wal jamaah* itu, barang-barang seisi rumah tidak terselamatkan dan tak

tersisa sama sekali. Sementara massa penyerang yang diduga berasal dari lima desa se Kecamatan Omben itu sampai sekarang belum ditangkap.

Pada saat kejadian, Tajul Muluk, pemimpin pondok pesantren yang dituduh menyebarkan ajaran Syi'ah, sudah lima bulan diungsikan ke Malang. Relokasi ke daerah Dieng, Malang yang dimulai sejak April 2011 itu dilakukan Pemerintah Kabupaten Sampang dan Pemerintah Propinsi Jatim atas desakan ulama Madura yang menolak kehadiran dan berkembangnya Syi'ah di Madura yang dinilai mengganggu ketentraman warga. Selama Tajul di Malang, yang disertai kepemimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda dengan santri 130 orang, rumah, toko dan madrasah dipasrahkan kepada Alimullah Muhin (22), santri asal Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Madura.

Alimullah atau yang biasa dipanggil Ust. Ali, sejak sekitar pukul 08.00 WIB, sebenarnya sudah mendengar bahwa ponpes akan dibakar. Saat massa dengan lantang menyerukan kalimat takbir, Ali meminta sebanyak 20 santri yang menginap di asrama dipulangkan. Sementara, Ali dan pengajar lainnya mengungsi ke rumah Nurhalimah yang rumahnya terletak sekitar 200 meter sebelah timur ponpes. Pada saat itu, Ali mengaku tidak berani mendatangi apalagi menghalau massa lantaran takut dibunuh.

Mendengar kabar dari Alimullah, Iklil maupun Tajul langsung menghubungi Kapolsek Omben untuk meminta perlindungan, karena ancaman penyerangan sebagaimana diinformasikan sehari sebelumnya memang benar adanya. Rabu 28 Desember 2011, Ust. Iklil Milal, kakak Tajul Muluk mengaku

dipanggil oleh Kapolsek Omben, Ajun Komisaris Aris di Kantor Polsek Omben. Pada pertemuan ini Kapolsek memberi tahu Iklil bahwa akan ada penyerangan ke Dusun Nangkrenang oleh kelompok anti-Syi'ah. Keterangan polisi ini antara lain didasarkan atas kenyataan bahwa pada hari itu, jalan setapak menuju Ponpes Misbahul Huda sudah diputus warga dengan cara diberi tumpukan batu dan ditancapi beberapa batang bambu dan besi.

Jumlah personil keamanan yang tidak sebanding dengan massa pemrotes membuat aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, pada pukul 09:15 WIB massa berjumlah lima ratusan orang yang datang dari lima desa itu dengan leluasa membakar Pesantren Tajul Muluk. Pesantren itu terdiri atas toko kelontong, gedung taman kanak-kanak, mushalla, asrama santri, dan rumah Tajul Muluk.

Menurut seorang informan sekitar pukul 10.30 WIB, saat hampir separuh Madrasah terbakar, sebenarnya 25 anggota Brimob bersenjata lengkap datang ke lokasi kejadian. Namun, sayangnya jumlah massa yang masih jauh lebih besar, membuat mereka juga tidak bisa melakukan tindakan pencegahan apapun, dan hanya bisa menunggu sampai semua bangunan itu terbakar, setelah itu baru mulai bergerak.

Belum usai pembakaran terhadap pesantren Tajul, satu jam berselang massa yang membawa parang dan celurit juga melakukan pembakaran terhadap rumah Iklil Milal yang terletak di Dusun Gading Laok, Desa Blu'uran, Kec Karang Penang yang kurang lebih berjarak dua kilo meter dari rumah Tajul. Tidak hanya itu, massa juga membakar Rumah Ummu Hanik, adik kandung

Tajul. Meski selama proses pembakaran berlangsung, ada kesan Polisi dengan sengaja melakukan pembiaran, tapi Iklil mengaku terus berupaya menenangkan jamaahnya yang berkumpul di rumah Tajul agar tidak melakukan tindak perlawanan.

Dituduh melakukan pembiaran, pihak Polisi balik mengatakan bahwa dua kompi aparat Kepolisian Resort Sampang tidak bisa masuk ke lokasi karena jalan menuju Nangkernang diblokir massa yang melengkapi diri dengan berbagai senjata tajam. Kapolres Sampang, AKBP Solehan menegaskan bahwa pada saat kejadian, polisi belum / tidak bisa masuk ke lokasi. Kedatangan polisi malah disambut acungan senjata tajam oleh massa penyerang. Massa mengancam akan membunuh, jika polisi tetap mencoba menghentikan aksi itu.

Menurut pengakuan warga, peristiwa pagi itu berjalan begitu cepat sehingga mereka tidak sempat mengetahui secara pasti identitas massa penyerang. Namun menurut dugaan mereka, sebagian besar pelaku, terutama yang menggunakan penutup wajah saat pembakaran, adalah tetangga mereka sendiri. Sebab, selama ini merekalah yang getol memusuhi keberadaan warga Syi'ah di Nangkernang. Sementara itu, Tajul Muluk dengan yakin mengatakan bahwa otak dan pemimpin aksi pembakaran itu adalah adiknya sendiri, yaitu Roisul Hukama yang telah berpindah ke Sunni sejak 2009. Pasalnya, pada saat kejadian, Rois Hukama tidak kelihatan sama sekali di tempat kejadian.

Setelah pembakaran berakhir pada pukul 13:00 WIB, khawatir kekerasan susulan akan terjadi, polisi pun mulai mengevakuasi sebagian jamaah. Baru malam Jumat, evakuasi yang menggunakan bus milik Polda Jatim itu selesai

dilakukan. Dari total 306 jemaah yang dievakuasi, hampir sebagian besar terdiri perempuan, anak-anak, bayi dan balita. Evakuasi ini tidak dilakukan kepada total jemaah Syi'ah di dusun Nangkernang yang berjumlah 584 orang atau 135 kepala keluarga. Awalnya, 306 jemaat itu diungsikan ke kantor Kecamatan Omben dengan dua fasilitas tenda dan dua kamar mandi darurat. Namun karena kondisi kecamatan Omben dirasa tidak cukup menampung jemaah Syi'ah dan dinilai terlalu rentan terhadap protes dan gerakan protes kelompok Sunni, akhirnya pada pukul 23.30 WIB, Kamis 29 Desember, jemaah Syi'ah dibawa ke Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Sampang.

Menurut pengakuan warga, pengungsian itu tidak dilakukan atas dasar kemauan pribadi, tapi dipaksa oleh petugas kepolisian dengan mendatangi rumah masing-masing warga yang sudah terdata sebagai anggota jemaah Syi'ah. Warga Syi'ah ini, diinstruksikan segera meninggalkan rumahnya tanpa diizinkan untuk mengemasi barang-barang. Karena itu, selama di pengungsian tak satupun harta benda yang mereka bawa. Relatif sebagian besar warga yang mengungsi hanya berbekal pakaian yang melekat di badan mereka.

b. Gerakan Protes Tanggal 26 Agustus 2012

Pada tanggal 26 Agustus 2012, kembali terjadi gerakan protes yang dilakukan oleh kelompok Islam lokal Madura terhadap komunitas penganut Syi'ah di Sampang. Pada sekitar pukul 08.00 WIB ratusan massa bersenjata tajam seperti celurit, pedang, dan pentungan serta bom molotov telah berkumpul di kampung Nangkernang untuk menghadang kepergian anak-anak penganut Syi'ah ke pondok pesantrennya seperti di Bangil dan di Pekalongan.

Mobilisasi struktur gerakan protes terjadi melalui himbauan yang disampaikan melalui pengeras suara di mushalla-mushalla termasuk mushalla milik Uztadz Rois Al Hukama agar para muslimin berkumpul menghadapi para penganut Syi'ah yang dianggap sesat. Selain itu, mobilisasi massa juga terjadi melalui jaringan telpon seluler, sehingga dalam waktu sekejap saja sudah ribuan orang berkumpul dan siap melakukan protes dengan kekerasan kapanpun ada komando dari aktor-aktor gerakan yang berada di belakang layar.

Gerakan protes 26 Agustus 2012 ini berawal dari tidak diijinkannya anak-anak penganut Syi'ah untuk kembali ke pondok pesantren di luar Sampang setelah selesai liburan Idul Fitri. Pada kasus gerakan protes 26 Agustus 2012 ini mengakibatkan satu orang bernama Hamama (50 tahun) tewas, 10 orang menderita luka kritis, dan belakangan satu orang lagi meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit serta puluhan orang mengalami luka-luka. Massa pemrotes juga merusak dan membakar rumah penganut Syi'ah, tercatat 48 rumah warga dibakar dan dirusak termasuk rumah pimpinan Syi'ah Sampang Uztadz Tajul Muluk yang sebelumnya pernah dibakar oleh para massa pemrotes yang sama. Gerakan protes ini juga menyebabkan penganut Syi'ah Sampang kehilangan harta benda, binatang ternak yang dijarah oleh kelompok anti-Syi'ah.

Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap 6 (enam) tersangka aktor-aktor gerakan protes dengan kekerasan terhadap Komunitas Penganut Syi'ah pada 26 Agustus 2012, masing-masing Mukhsin alias Tamam Bin Mohamad Rowi 10 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan, Mat Safi bin

Misnoto dengan 1 tahun 6 bulan penjara dengan pasal penganiayaan, Saniwan alias Muhriyah 8 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan, dan Saripin 8 bulan penjara dengan pasal pengeroyokan. Sementara Rois Al Hukama yang diduga sebagai terdakwa utama justru divonis bebas pada 16 April 2013. Sementara Hadiri alias Hosen didakwa pelaku pembunuhan terhadap Hamamah divonis 4 tahun penjara;

Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan Iklil (Kakak kandung Utstadz Tajul Muluk) melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Omben dan Polres Sampang melalui telepon selulernya. Pihak kepolisian menanggapi laporan tersebut dengan mengirim 5 (lima) personil ke lokasi. Pada pukul 11.00 WIB, massa yang telah berkumpul mulai melakukan protes dengan cara menghadang anak-anak muslim Syi'ah yang akan kembali ke pesantren mereka di luar kota Sampang. Para laki-laki dewasa muslim Syi'ah berusaha melindungi anak-anak dan istri mereka.

Massa terus menyerang dengan lemparan batu, bom molotov dan menikam dengan senjata tajam. Setelah peristiwa aksi protes dengan kekerasan 26 Agustus 2012, Pada tanggal 20 Juni 2013 sekitar 168 warga Syi'ah Sampang direlokasi paksa oleh Pemerintah Kabupaten Sampang ke Rumah Susun Puspo Argo Sidoarjo dengan menggunakan 3 truk dan 2 bus polisi dan dikawal oleh 3 mobil patroli.

Pasca insiden ini dan sebelum meletusnya peristiwa aksi protes massa Agustus 2012 itu, sebenarnya teror dan intimidasi itu tidak hanya dialami Tajul Muluk seorang diri, tapi juga jemaahnya. Paling tidak pasca Rois menyatakan

keluar dari Sunni pada 2009, santri Iklil dan murid dari Tajul sudah dicibir masyarakat sekitar sebagai penganut paham sesat. Meski awalnya semua warga tidak memusuhi, namun karena provokasi dan intimidasi yang dilakukan kroni Rois melalui pengajian itu begitu massif, semua warga pun akhirnya juga ikut-ikut menyesatkan mereka. Tidak hanya dalam bentuk omongan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka kerap diperlakukan secara berbeda. Misalnya ketika diundang acara tahlilan, sering kali orang Sunni tidak mau datang. Kalaupun bersedia datang, mereka pasti tidak akan mau memakan hidangan yang diberikan.

“Mereka ini seringkali manut sama kyainya yang mengatakan masakannya orang Syi’ah haram. Bahkan sumbangan beras dari kami ketika mereka hajatan, lebih senang diberikan pada ayam. Tidak hanya itu mas, malah mereka mengatakan istri lak-laki Syi’ah ini halal.” Bahkan para kyai Sunni, menurut keterangan Rahman, menyerukan kepada jamaahnya untuk memalingkan wajah ketika bertemu orang Syi’ah.³⁶

Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat, stereotip sesat ini juga dialami siswa yang sekolah di Kecamatan Omben. Feri,³⁷ siswa kelas 3 SMP ini mengaku terus menerus merasa dikucilkan oleh teman-teman satu kelasnya. Bahkan, beberapa gurunya juga tidak segan-segan mengatakan kepada murid-murid yang lain bahwa Syi’ah itu sesat. “Saya ini seorang Syi’ah sendiri Mas dan saya dikucilkan teman-teman dari pergaulan.”

³⁶ Rahman, adalah simpatisan Syi’ah yang sudah keluar dan menyatakan bertaubat dengan menandatangani surat pernyataan kembali ke *Ahlussunnah* lagi. *Wawancara* Sampang, 05 Januari 2014.

³⁷ Feri, *Wawancara* Sampang, 07 Januari 2014.

Berbeda dengan pengalaman pahit yang dialami Masyus, Dzikrul Zakki, siswa SMKN 2 Sampang ini mengaku memang tidak menerima pengucilan dari teman-teman sekelasnya karena jarak sekolahnya relatif jauh dari Desa Karang Gayam. Tapi intimidasi itu dia terima ketika pulang dari sekolah dan sedang kembali ke Pondok ust. Tajul. Dia mengaku, hampir setiap hari mendapat teror dari masyarakat yang tinggal di sekitar jalan yang ia lewati. “Hey kamu Anak Syi’ah Sesat, berani tidak lawan Aku.”³⁸

Menurut pengakuan komunitas Syi’ah, sebenarnya dari dulu warga Syi’ah itu mengalah, termasuk ketika kyai di daerahnya mengusir Tajul pada 2011 yang lalu. Dan Iklil mengaku, bahwa sebenarnya warga Syi’ah juga mencoba terbuka dan selalu menolong warga Sunni. Karena itu, Iklil sangat menyayangkan, mengapa tetangganya sendiri yang biasa mereka bantu dengan tega membakar dan memusuhi dia dan santrinya. Terkait dengan kabar bahwa ini merupakan konflik keluarga, dengan tegas Iklil mengatakan bahwa kasus ini hanya momentumnya saja yang ketemu dan konflik yang ada dalam keluarganya sengaja dimanfaatkan. “Kalau memang ini konflik keluarga, tentu yang memusuhi kami paling terbatas pada kyai dan santrinya, tapi sampeyan lihat sendiri semua orang dari pemda sampai lurah memusuhi kami karena dianggap sesat.”³⁹

Ali mengakui bahwa perbedaan antara konflik keluarga dengan konflik keagamaan di Sampang ini memang sulit dibedakan. Karena semua kyai

³⁸ Zakki adalah penganut Syi’ah yang memilih melanjutkan sekolahnya di kota Sampang dengan cara indekos di sebuah rumah sederhana dekat sekolahnya SMKN 1 Sampang. *Wawancara* Sampang, 05 Januari 2014.

³⁹ Ali, warga Syi’ah yang mengungsi ke rumah kerabatnya di Pamekasan *Wawancara*, Pamekasan, 06 Januari 2014.

di sini pada dasarnya adalah saudara. Sehingga kalau semua kyai memusuhinya karena paham keagamaan yang berbeda terus dikatakan sebagai konflik keluarga itu wajar. Karena satu kyai dengan kyai lainnya pasti memiliki hubungan darah.

Mengamini pernyataan tersebut, meski dengan penekanan yang berbeda, Ridwan, salah seorang warga Syi'ah mengakui bahwa konflik dalam keluarga Ustadz Tajul sengaja dimanfaatkan pihak luar untuk menghancurkannya. "Kalau ini memang keluarga, bukankah penangkapan Rois sudah cukup menyelesaikan masalah, tapi toh nyatanya polisi ketakutan menangkapnya dengan alasan, jika Rois ditangkap akan ada pihak luar yang tidak terima."⁴⁰

Meski begitu, Tajul juga nampak merasa enggan untuk menyebut ini adalah konflik Sunni- Syi'ah. Dia lebih senang menyebut konflik ini sebagai konflik HAM. Masalahnya, jika konflik paham keagamaan yang dihembuskan, dia khawatir dunia akan berperang hanya karena dirinya.

Akhirnya, aksi protes yang dilakukan oleh kelompok Islam lokal Madura yang tergabung dalam beberapa elemen *civil society* berhasil mengusir dan membersihkan komunitasnya di Desa Karang gayam dari ideologi yang mereka anggap sesat dan meresahkan warga setempat.

5. Dampak Gerakan Protes

Sebagaimana paparan di atas, bagi kedua kelompok yang berseteru, dampak yang ditimbulkan dari terjadinya gerakan protes ini, tentu saja akan berbeda. Bagi kelompok Sunni yang melakukan protes; dampaknya tidak separah dengan apa yang terjadi pada kelompok Syi'ah. Walaupun demikian, ikatan-ikatan

⁴⁰ Ridwan, warga Syi'ah. *Wawancara*, Sampang, 06 Januari 2014.

kekeluargaan, kesamaan etnis dan budaya, maupun modal sosial lainnya telah lenyap akibat terjadinya perseteruan ini. Akan tetapi, kelompok pemrotes merasa bahwa hasil yang diperoleh jauh lebih besar dari pada harga yang harus dibayar. Apalagi praktek-praktek polisional,⁴¹ dalam arti respon pihak keamanan terhadap gerakan protes sangat toleran, bahkan terkesan memberikan dukungan yang turut menciptakan gerakan protes yang tertata dan berskala besar.

Sementara dampak yang dialami oleh kelompok Syi'ah akibat gerakan protes ini, bersifat kompleks dan multi dimensional; baik ekonomi, sosial, politik, keagamaan, psikologis, pendidikan, maupun dampak secara hukum terkait dengan status kewarganegaraannya di depan hukum negara demokrasi yang menganut prinsip kesamaan di depan hukum (*equality before the law*).

a. Dampak secara ekonomi

Dampak yang ditimbulkan jelas membawa kerugian material yang tidak sedikit. Selain pemusnahan aset-aset keluarga Syi'ah, para pengungsi yang sekarang ditempatkan di Puspa Agro Jemundo, juga tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sama sekali. Untuk bertahan hidup di lokasi pengungsian saja, mereka seratus persen tergantung kepada bantuan Pemkab Sampang maupun Pemprov Jawa Timur.

b. Dampak secara Sosial

Kelompok Syi'ah tercerabut dari akar budayanya, sehingga modal sosial dan nilai-nilai yang selama ini dipraktekkan bersama, yang berfungsi sebagai solidaritas sosial bersama turut lenyap pula seiring dengan upaya paksa relokasi

⁴¹ Lihat lebih detail dalam: Donna Tella Della Porta, Dalam Quintan Wictorowics. *Gerakan Sosial Islam...* 333.

mereka keluar dari Sampang. Secara politik, mereka terancam tidak mendapatkan hak-hak politik sebagaimana warga negara lainnya yang dilindungi undang-undang, sehingga hak-hak sipil mereka rawan untuk diabaikan oleh negara.

c. Dampak secara Keagamaan

Kelompok Syi'ah merasa kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal, pasal 28E, serta hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan kepercayaan dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, pasal 28E, telah lenyap sebagai dampak langsung dari gerakan protes tersebut.

d. Dampak secara Psikologis

Kelompok Syi'ah merasa terancam dan tidak aman. Mereka merasa bahwa negara tidak memberikan perlindungan yang memadai secara psikologis sesuai dengan UUD 1945 pasal 28G "Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, serta Hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Hak atas rasa aman, tenang serta perlindungan dari intimidasi, pasal 30.

e. Dampak secara Pendidikan

Sebagai akibat gerakan protes, anak-anak kelompok Syi'ah terancam tidak mendapatkan hak akses terhadap pendidikan yang layak. Selama berada di pengungsian mulai awal 2012, anak-anak kelompok Syi'ah tidak bisa melanjutkan

sekolah-sekolah mereka. Padahal, pendidikan adalah salah satu hak Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mencakup: 1. hak tumbuh berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 4 dan pasal 54. 2. hak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, pasal 6, 42 (1) dan (2); 43 (1) dan (2) 3. hak untuk mendapat pendidikan pasal 9, 48 dan 49 4.hak beristirahat, bermain, rekreasi, pasal 11.

f. Dampak secara Hukum

Dampak secara hukum ini terkait dengan status kewarganegaraannya adalah sebuah arena yang lebih rumit lagi. Dengan mengambil kasus gerakan protes menentang kelompok Syi'ah ini, konsep kewarganegaraan akan menimbulkan kontradiksi yang nyata. Pertama-tama, perlu diawali dengan pertanyaan; jika suatu golongan (misalnya; NU, FMU, MUI, BASSRA) menolak asosiasi kelompok Syi'ah ke dalam golongan agama Islam secara umum, sikap apa yang harus diambil oleh negara?

Di sini pertanyaan mengenai identitas muncul dalam dua tingkat; pertama persoalan identifikasi partikular Syi'ah dalam hubungannya sebagai anggota komunitas muslim secara luas; kedua, sejauhmana implikasi ketegangan dalam identifikasi partikular itu berpengaruh terhadap identifikasi universalnya sebagai warga negara. Apakah penolakan dalam sistem identifikasi partikularnya berpengaruh atau mesti diakomodasi dengan penolakan dalam identifikasi universalnya. Singkatnya, apabila Islam lokal Madura menolak Syi'ah sebagai bagian dari umat Islam, apakah negara kemudian bisa menolak kelompok Syi'ah

di Sampang dan memberlakukannya bukan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki *privilege* sebagai warga dengan hak-hak sipil dan sosial yang diakui dalam sebuah masyarakat demokrasi.

Masalah yang muncul berikutnya akan lebih rumit lagi. Jika kelompok Syi'ah dengan berbasis pada konsepsi hak-hak konstitusionalnya, bersikukuh untuk tetap mempertahankan sistem identifikasi partikularnya sendiri sehingga bertentangan dengan kelompok *civil society* di Sampang (NU, MUI, FMU dan BASSRA), apa yang akan dilakukan pemerintah? Dalam kasus gerakan sosial di Karang Gayam Omben Sampang ini, negara mengambil “jalan tengah,” yakni dengan mencoba memisahkan system identifikasi partikular kelompok Syi'ah dari identifikasi universalnya sebagai warga negara. Tetapi pemisahan itu dilakukan dengan tujuan untuk melindungi identitas dan hak-hak kewargaan universalnya, kelompok Syi'ah di Sampang diminta untuk menanggalkan identitas partikularnya.

Kebijakan negara itu tertuang dalam kesimpulan BAKOR PAKEM tanggal 4 Januari 2012, berpijak pada fatwa MUI Pusat tanggal 6 November 2007 dan dari informasi-informasi tersedia terkait kehadiran Syi'ah di NU bahwa ajaran yang disebarkan oleh Tajul Muluk “adalah sesat dan menyesatkan serta meresahkan masyarakat” dan Tajul Muluk “telah melakukan penistaan agama dan melanggar Penetapan Presiden RI No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, dan harus ditindak secara hukum yang berlaku.”

Serta dalam fatwa MUI Madura tanggal 14 Januari 2012 bahwa ajaran *Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah* adalah sesat dan menyesatkan masyarakat serta menistakan agama; mengusulkan agar Pemda masing-masing kabupaten di Madura membekukan ajaran Syi'ah, dan kepada MUI pusat untuk mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syi'ah adalah sesat. Dengan demikian, berarti bahwa perlindungan negara diberikan dengan syarat kelompok Syi'ah itu “sudah tidak menjadi Syi'ah lagi.”

Di sinilah kontradiksi kewargaannya muncul. Bagi kelompok Syi'ah, hak-haknya sebagai warga negara (identifikasi universal) hanya berarti jika eksistensi dalam identifikasi partikularnya diakui. Bagi kelompok Syi'ah, dengan ditanggalkannya identitas partikularnya, lenyap pula keseluruhan identitas universalnya. Hak-haknya sebagai warga negara hanya akan berarti bila eksistensinya sebagai Syi'ah diakui lebih dahulu. Kelompok Syi'ah menjadi warga negara Indonesia apabila identitasnya sebagai Syi'ah diterima. Dengan demikian, sebenarnya keputusan Bakor Pakem Sampang serta MUI tersebut hanya mengeksplisitkan kemungkinan paling buruk bagi keberadaan suatu kelompok yaitu hilangnya identitas kewargaan.

Bisa diandaikan, apabila kelompok Syi'ah bersikukuh tidak mau melepaskan identitas partikularnya, maka ia akan menjadi manusia tanpa status kewargaan, dan tanpa status kewargaan ini “bukan siapa-siapa”. Secara hukum, kelompok yang “bukan siapa-siapa” ini tidak akan memperoleh hak-hak apapun termasuk perlindungan dari negara. Oleh karena itu, dalam konflik membangun resolusi konflik beragama dan konflik sosial lainnya, rekonfigurasi konsep

kewarganegaraan, seperti yang dianjurkan Kalidjernih⁴² dipandang signifikan demi menciptakan keseimbangan hubungan antara warga (*citizen*) dan negara (*state*) dimana kedaulatan justru berada di pihak rakyat, bukan pada elit politik / negara.

Dengan konfigurasi baru itu, bukan saja integralistik, keseragaman, dan sentralistik dapat ditepis, tetapi keragaman, ke-bhineka-an dan kemajemukan dapat dijaga dan dikembangkan sebagai sumber energi utama dinamika perjalanan bangsa. Dengan mengembalikan kedaulatan pada rakyat, maka setiap kebijakan publik diwajibkan dapat pemeratakan kesejahteraan, menciptakan keadilan, menegakkan supremasi hukum, demokrasi dan masyarakat sipil, sehingga konflik-konflik sosial dapat diinstitutionalisasi atau diregulasi menjadi kekuatan dinamik sebuah bangsa.

Tetapi, rekonfigurasi kewarganegaraan, juga mengharuskan terjadinya reinterpretasi bahkan perubahan beberapa konsep yang selama ini menjadi acuan utama pengambilan kebijakan publik. Salah satu yang penting adalah konsep kewarganegaraan yang dalam praktiknya selalu dipakai secara sepihak untuk pengambilan kebijakan publik yang menguntungkan kelompok tertentu. Dalam konteks ini konsep “kewargaan” tanpa mengaitkan dengan negara perlu dipertimbangkan. Kewarganegaraan dan kewargaan adalah dua konsep yang berbeda. Jika kewarganegaraan menyandarkan diri pada totalitarianism, dimana pusat otoritas dan otonomi berada di pihak sekelompok politisi dan elit yang lain, maka kewargaan menyandarkan diri pada basis warga yang otonom dan

⁴² Lihat lebih detail dalam Freddy Kirana Kalidjernih, *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan politikal*, (Jakarta: Widya Aksara Press, 2010), 66.

partisipatif. Dalam sebuah republik, warga disebut warga karena ia terlibat secara bebas dan merata dalam sebuah praktik mempertahankan kemaslahatan umum atau *common good*.

E. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan serta analisis data dari BAB IV, berikut ini terdapat beberapa temuan penelitian. Temuan-temuan penelitian tersebut adalah:

1. Orang Madura adalah sebuah etnik dan entitas budaya yang khas. Dari pengamatan interaksi simbolis masyarakat Kecamatan Omben, secara umum hubungan sosial budaya memberikan suatu gambaran tidak sebagaimana yang sering dicitrakan tentang orang Madura pada umumnya oleh kelompok etnik lain. Gambaran orang Madura yang lazim dikemukakan oleh kelompok etnik lain jauh berbeda dari pandangan orang Madura tentang diri mereka sendiri, dan sering mengarah pada pandangan stereotipnya. Memang sering gambaran tentang suatu kelompok dari luar kelompoknya bersifat stereotip dan negatif.⁴³

Orang Madura selama ini dikenal sebagai orang yang keras, senang membunuh, mudah tersinggung, pendendam, tidak toleransi terhadap orang lain, dan fanatis dalam beragama. Sementara menurut orang Madura sendiri, pada dasarnya ada tiga dasar citra diri mereka. Yaitu kesopanan, kehormatan, dan Islam, lebih khusus lagi Islam dengan aliran Sunni.

⁴³ Bandingkan Bustami Rahman, *Karakter Orang Madura di Surabaya, Beberapa Pikiran Mengenai Latar belakang dan Perkembangannya*. (Jember: Pusat-pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Universitas Jember. 1989), 34. Bandingkan juga dengan Abdurrachman. *Sejarah Madura Selayang Pandang*, cetakan ketiga, (Sumenep: The Sun, 1988), 233.

2. Dilihat dari berbagai aspek keadaan penduduknya, misalnya; mata pencaharian, tingkat pendidikan, serta kondisi keberagamaannya, terlihat sebuah pola kependudukan yang menggambarkan sebuah kondisi dengan akses pendidikan serta ekonomi yang masih rendah, serta pola keberagaman yang monolitik.
3. Gerakan protes Islam lokal Madura yang tergabung dalam beberapa wadah *civil society* seperti FMU (Forum Musyawarah Ulama Sampang-Pamekasan), BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama se-Madura), NU (Nahdlatul Ulama), serta MUI (Majelis Ulama Indonesia) cabang Sampang sejauh ini dalam kacamata para pemrotes bisa dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan dari agenda aksi.
4. Konteks sosio-religius sebagai tujuan eksplisit gerakan protes. Dalam konteks ini, tujuan yang disuarakan oleh para pemrotes Islam lokal Madura, pada dasarnya adalah sebuah kepedulian terhadap upaya pemurnian agama, atau lebih tepatnya pemurnian ajaran agama Islam yang sesuai dengan madzhab *Ahlu Sunnah wal Jamaah* atau Islam Sunni, sehingga ajaran dan praktek Islam dengan aliran atau madzhab yang berbeda seperti aliran Syi'ah akan dianggap sebagai kelompok *liyan*.
5. Tujuan implisit gerakan protes dalam konteks sosio-kultural, ajaran Syi'ah Tajul Muluk ini dinilai akan menggerus tingkat kehormatan para elit-elit gerakan protes. Hal ini karena ajaran Syi'ah terus menggaungkan pentingnya memberikan rasa hormat hanya kepada para Imam Syi'ah yang diyakini ma'sum dari dosa. Sementara budaya lokal Madura pada umumnya, menekankan pentingnya memberikan rasa hormat yang mendalam kepada para

guru agama setelah kedua orang tua. ajaran Syi'ah Tajul Muluk yang berbanding terbalik dengan budaya lokal Madura ini diyakini akan mengganggu zona nyaman (*comfort zone*) yang sudah dinikmati oleh para elit gerakan protes dalam hal ini para kyai Madura.

6. Tujuan implisit yang lain dari gerakan protes ini adalah dalam konteks sosio-politik Madura,⁴⁴ para kyai dan ulama pada umumnya adalah para tokoh masyarakat yang memiliki basis massa patron klien yang kuat. Tidak ada tokoh formal maupun tokoh informal yang memiliki pengaruh melebihi dari pengaruh para kyai, dan para ulama atau kyai di Madura (termasuk Sampang) pada umumnya adalah pengikut ajaran Islam Sunni yang jelas berbeda dengan ajaran Syi'ah. Artinya, dukungan kyai adalah jaminan bagi setiap politisi di Madura untuk memenangkan kontestasi politik di daerahnya. Karena itulah, Bupati dan politisi Sampang cenderung mengamini segala sikap dan tuntutan para kyai.

Faktor inilah yang menjadi penegasan mengapa organisasi masyarakat sipil yang aktor-aktornya tidak lain adalah para kyai mempunyai peran yang signifikan secara vertikal berhadapan dengan Pemerintah Kabupaten Sampang yang dalam hal ini adalah pihak keamanan. Posisi tawar (*bargaining power*) yang signifikan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi para aktor gerakan protes dalam upaya memobilisasi massa. Adapun, peran secara horizontal, organisasi ini menjadi wadah para aktor-aktor gerakan untuk merancang dan memobilisir sebanyak mungkin massa pemrotes. Di samping itu, meyakinkan massa bahwa

⁴⁴ Latif Wiyata, *Wawancara*, Bangkalan, 20 Desember 2013.

gerakan-gerakan protes yang dilakukan walaupun harus memakai sarana kekerasan adalah *legal* dan *legitimate* baik secara agama (Islam) maupun secara budaya (Madura).

7. Tujuan implisit yang lain dari gerakan protes ini adalah dalam konteks sosio-ekonomi, ajaran Syi'ah ala Tajul Muluk di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, berusaha menghapus tradisi perayaan maulid Nabi yang sudah mengakar di masyarakat. Tradisi ini bahkan sudah berkembang menjadi konsep *tengka*⁴⁵ sosial di Madura. Hal ini mengundang resistensi yang kuat terutama di kalangan elit-elit keagamaan orang Madura, yakni para kyai. Para kyai inilah yang kemudian menggalang kekuatan massa untuk memprotes ajaran Syi'ah yang menyoal tradisi perayaan maulid. Dalam pandangan peneliti, hal ini lebih terkait dengan keberlangsungan pola sarana produksi dengan sistem prebendal yang selama ini menjadi *privilege* para kyai, serta tidak terkait dengan persoalan pemurnian agama seperti yang selama ini dijadikan *framing* gerakan protes.
8. Pada umumnya, teori gerakan sosial serta postulat-postulat kuncinya seperti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keluhan sosial (*grievance*), budaya dan etnisitas, serta struktur kesempatan politik (*political opportunity srtructure*), terjadinya pembingkaiian gerakan protes (*framing*), maupun bagaimana bentuk protes Islam lokal berlangsung, seperti inovasi tindakan

⁴⁵ Konsep *tengka* sosial (red.) adalah sebuah tradisi yang mengikat setiap warga untuk melaksanakannya. Bahkan tradisi ini menjadi sarana pamer kemampuan secara ekonomi setiap warga yang menyelenggarakan perayaan maulid, sehingga tidak jarang sangat memberatkan warga masyarakat yang kurang mampu. Banyak dari warga di Kabupaten Sampang khususnya dan Madura umumnya terpaksa menjual harta benda yang berharga seperti tanah, ternak serta terlilit hutang yang tidak sedikit setelah melaksanakan perayaan maulid nabi.

kolektif, maupun mobilisasi struktur, yang menjadi landasan penelitian ini bisa menjadi kaca mata, yang menjelaskan semua fenomena gerakan protes Islam lokal Madura di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Dari paparan di atas, konseptualisasi dari temuan penelitian ini adalah terkait dengan ‘alasan’ serta ‘motif’ tindakan sosial.⁴⁶ ‘Alasan’ bagi terjadinya tindakan aksi protes ini adalah konteks religius sebagaimana ulasan pada temuan penelitian poin keempat di atas. Sementara ‘motif’ terjadinya gerakan protes ini berkaitan dengan orientasi tindakan kolektif yang terdiri dari: (1.) Orientasi budaya sebagaimana dipaparkan pada poin kelima dari temuan penelitian di atas. (2.) Orientasi politik lokal sebagaimana yang dipaparkan pada poin keenam dari temuan penelitian di atas. (3.) Orientasi ekonomi sebagaimana dipaparkan pada poin ketujuh dari temuan penelitian di atas.

⁴⁶Ulasan tentang perbedaan alasan dan motif tindakan yang menarik bisa dilihat dalam Ignas Kleden, Teori Ilmu Sosial sebagai Variabel Sosial, suatu Tinjauan Filsafat Sosial dalam *Prisma* N0.6, Jakarta : LP3ES), 19-35. Menurut Kleden sebenarnya alasan hanyalah justifikasi untuk melakukan sebuah tindakan. Sementara motif adalah orientasi seseorang dalam melakukan tindakan. Seseorang melakukan tindakan sosial dalam banyak hal seringkali hanya mengemukakan alasan saja dan tidak mengungkapkan motif sesungguhnya yang menjadi latar belakang terjadinya tindakan sosial.